

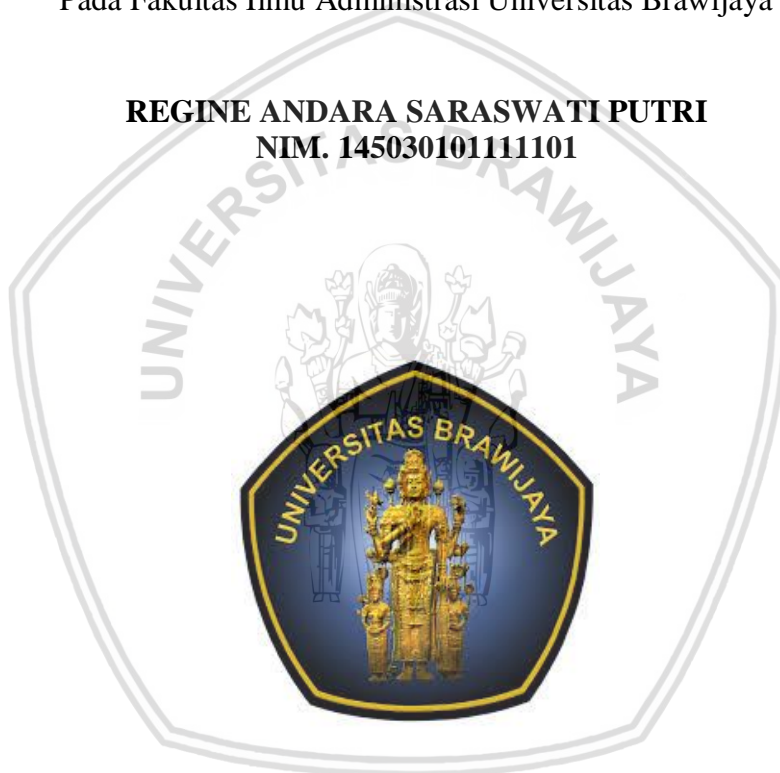
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETERNAK SAPI PERAH

(STUDI DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

REGINE ANDARA SARASWATI PUTRI
NIM. 145030101111101



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al – Insyirah : 5)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah (Studi di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)

Disusun Oleh : Regine Andara Saraswati Putri

NIM : 145030101111101

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik


Konsentrasi : -

Malang, 18 April 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002


Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah (Studi di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 18 April 2018



Regine Andara Saraswati Putri
NIM. 145030101111101

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 03 Mei 2018

Jam : 08.00-09.00 WIB

Skripsi atas nama : Regine Andara Saraswati Putri

Judul : Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan
Peternak Sapi Perah (Studi di Kecamatan Senduro
Kabupaten Lumajang)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua


Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP.19520911 197903 1 002

Anggota


Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

Anggota


Dr. Ainul Hayat, M.Si
NIP.19730713 200604 1 001

Anggota


Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA
NIP.19860716 201404 1 001

LEMBAR PERSEMBAHAN

UNTUK KEDUA ORANGTUAKU, KELUARGA DAN ORANG – ORANG
DISEKELILINGKU YANG TELAH MENDUKUNGU



RINGKASAN

Regine Andara Saraswati Putri. 2018. **Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah (Studi di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)**. Pembimbing: Drs. Heru Ribawanto MS. dan Drs. Minto Hadi M.Si.

Salah satu strategi pemerintah mengembangkan peternakan sapi perah adalah dengan memberdayakan peternak sapi perah karena pemberdayaan terhadap peternak sapi perah merupakan salah satu bentuk kegiatan pembangunan yang menitik beratkan pada sumber daya manusia yang bersama menjadi subjek pembangunan. Selain itu, pemberdayaan mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki agar individu, kelompok ataupun komunitas dapat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mendeskripsikan strategi pemerintah Dinas Pertanian kabupaten Lumajang dalam memberdayakan peternak sapi perah di kecamatan Senduro, 2) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan peternak sapi perah di kecamatan Senduro.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di kecamatan Senduro, kabupaten Lumajang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis menggunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan menggambarkan serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Strategi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dalam memberikan pemberdayaan kepada peternak sapi perah telah berjalan dengan baik dan bermanfaat seperti pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, bantuan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif dan juga penyediaan informasi yang tepat guna. Namun ada beberapa strategi pemberdayaan yang masih perlu di tingkatkan lagi oleh Dinas Pertanian kabupaten Lumajang seperti pengembangan usaha produktif. 2) Faktor pendukung dalam kegiatan pemberdayaan peternak sapi perah antara lain tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan raya dan jalan produksi, ketersediaan pakan yang mencukupi, ketersediaan bibit yang mudah di dapat dan akses distribusi yang baik dan lancar. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya sehingga masih banyak hewan ternak yang terserang penyakit. Serta kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sehingga peternak sapi perah masih belum bisa diberdayakan dengan baik.

Saran dari penelitian ini, hendaknya pemerintah lebih intensif dalam memberikan penyuluhan kepada peternak sapi perah sehingga hubungan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar selalu terjaga.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Peternak Sapi Perah.

SUMMARY

Regine Andara Saraswati Putri. 2018. **Strategy of the local Government in Empowering Dairy Farmers (Study in Sub district of Senduro, Lumajang of Regency)**. Supervisor: Drs. Heru Ribawanto MS. and Drs. Minto Hadi M.Si.

One of the government's strategy to develop dairy farm is to empower dairy farmers, because empowerment for dairy farmers is one of the development activities that emphasize on the development of human resources which together become the subject of development. Then, empowerment to develop skills and to exploit the potential of individual, group or community can try to control their own lives and seek to shape the future in accordance with the wishes. This research aims to; 1) Describe to government's strategy of Departement Agricultural Lumajang Regency to empowering dairy farmers in Senduro Sub district, 2) Describe to factors enabling and inhibiting in the empowerment of dairy farmers in Senduro Sub district.

This research uses qualitative and decriptive approach. The research location in Senduro Sub district and Lumajang Regency. The technique of data collection used by interview, observation and documentation. While technical analysis using interactive model that consists of data collection, condensation, data presentation and describe and draw conclusions.

The results showed that; 1) The Strategy Departement of Agricultural Lumajang Regency to empowering dairy farmers has been running well and useful such as human resources development, group institutional development, fertilization society capital, productive business development and also the provision of appropriate information. However, there are several empowerment strategies that still need to be improved by the Departement of Agricultural Lumajang Regency such as the development of productive enterprises. 2) Supporting factors in the empowerment activities of dairy farmers, among others the availability of facilities and infrastructure such as roads and production roads, availability of adequate feed, availability of easily accessible seeds and access to good distribution and smooth. While the inhibiting factor of empowerment activities of dairy farmers is the lack of awareness of the community in maintaining the cleanliness of the environment so there are still many livestock affected by the disease. And lack of counseling conducted by the Department of Agriculture so dairy farmers still can not be empowered properly.

Recommendations are the governmnet's should be more intensive for giving conceling to dairy farmers and also the importance of communication relationship between government and society in order to always be awake.

Keywords: *Government, Empowering, Dairy Farmer*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Startegi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah (Studi di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D. selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS. selaku Dosen Ketua Pembimbing Skripsi yang senantiasa menjadi bapak pembimbing untuk menulis dan berdiskusi
5. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si. selaku Dosen Anggota Pembimbing Skripsi yang senantiasa menjadi bapak pembimbing untuk menulis dan berdiskusi
6. Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang beserta jajarannya
7. Bapak Drh. Endra Novianto selaku Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang
8. Bapak Bari selaku Sekertaris KUD.Tani Makmur di Senduro
9. Sumber informan yang telah memberikan sambutan dan meluangkan waktu untuk memberikan pernyataan dan juga diskusi.

10. Ayahanda Agus Riyanto dan Ibunda Siti Sunarsih tercinta, yang telah memberikan doa dan semangatnya
11. Saudara Yugmaya Aji Rama Suta yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudari Mida yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman – teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2014 yang selalu memberikan dukungan dan inspirasi untuk penulis.

Demikian atas persembahan penulisan ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih belum sempurna dan juga memiliki kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga pihak – pihak yang berkepentingan untuk kemajuan pembangunan di Indonesia.

Malang, 18 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------------|
| MOTTO | ii |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iv |
| TANDA PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | vi |
| RINGKASAN..... | vii |
| SUMMARY..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kontribusi Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Pemerintah Daerah | 13 |
| 1. Pengertian Pemerintah Daerah..... | 13 |
| 2. Urusan Pemerintah Daerah | 14 |
| 3. Fungsi Pemerintah Daerah..... | 16 |
| 4. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Peternakan | 17 |
| B. Konsep Strategi | 19 |
| 1. Pengertian Strategi | 19 |
| 2. Manfaat Strategi..... | 21 |
| 3. Jenis – Jenis Strategi | 22 |
| 4. Manajemen Strategi | 22 |
| 5. Rencana Strategi | 24 |
| C. Pemberdayaan | 32 |
| 1. Pengertian Pemberdayaan | 32 |
| 2. Tujuan Pemberdayaan | 35 |
| 3. Model – Model Pemberdayaan | 36 |
| 4. Tahapan Pemberdayaan..... | 37 |
| 5. Pendekatan Pemberdayaan | 38 |
| 6. Strategi Pemberdayaan | 39 |
| 7. Indikator Pemberdayaan..... | 44 |
| D. Peternakan Sapi Perah | 46 |
| 1. Usaha Peternakan Sapi Perah | 46 |
| 2. Komoditi Susu dan Perkembangannya | 48 |

| | |
|---|----------------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 51 |
| A. Jenis Penelitian | 51 |
| B. Fokus Penelitian | 52 |
| C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian | 53 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 54 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 55 |
| F. Instrumen Penelitian..... | 56 |
| G. Analisa Data..... | 58 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 61 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 61 |
| 1. Wilayah Kabupaten Lumajang | 61 |
| 2. Wilayah Kecamatan Senduro | 62 |
| B. Hasil Penyajian Data | 64 |
| 1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah..... | 64 |
| a. Pengembangan Sumberdaya Manusia | 64 |
| b. Pengembangan Kelembagaan Kelompok..... | 70 |
| c. Bantuan Modal Masyarakat | 73 |
| d. Pengembangan Usaha Produktif | 76 |
| e. Penyediaan Informasi Tepat Guna..... | 79 |
| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat | 81 |
| a. Faktor Pendukung | 81 |
| b. Faktor Penghambat | 91 |
| C. Hasil Analisis Data..... | 94 |
| 1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah..... | 94 |
| a. Pengembangan Sumberdaya Manusia | 94 |
| b. Pengembangan Kelembagaan Kelompok..... | 97 |
| c. Bantuan Modal Masyarakat | 99 |
| d. Pengembangan Usaha Produktif | 101 |
| e. Penyediaan Informasi Tepat Guna..... | 102 |
| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat | 104 |
| a. Faktor Pendukung | 104 |
| b. Faktor Penghambat | 107 |
| BAB V PENUTUP | 110 |
| A. Kesimpulan | 110 |
| B. Saran | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 113 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Jumlah Populasi Sapi Perah, Produksi Susu Sapi Perah dan Konsumsi Susu Nasional Periode 2006 - 2012 | 5 |
| Tabel 2. Populasi Sapi Perah Menurut Provinsi, 2012 - 2016 | 5 |
| Tabel 3. Data Populasi Ternak Besar Kab. Lumajang | 7 |
| Tabel 4. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Lumajang Tahun 2015 | 62 |
| Tabel 5. Data Jumlah Anggota Kelompok Peternak Sapi Perah | 71 |
| Tabel 6. Tabel Penerima KUR Tahun 2017 | 76 |
| Tabel 7. Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan Tahun 2016 | 82 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Unsur – Unsur Pemberdayaan Masyarakat | 34 |
| Gambar 2. Tahap Pemberdayaan | 37 |
| Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif | 59 |
| Gambar 4. Peserta Penyuluhan Memperaktekkan Membuat Silase | 68 |
| Gambar 5. Hasil dari Teknologi Pengolahan Pakan Ternak | 69 |
| Gambar 6. Penyuluhan Teknologi Pasca Panen | 76 |
| Gambar 7. Tipe Komunikasi Dua Arah | 81 |
| Gambar 8. Jalan Produksi Desa Kandangtepus | 83 |
| Gambar 9. Jalan Produksi Desa Kandangan | 84 |
| Gambar 10. Jalan Produksi Desa Burno | 84 |
| Gambar 11. Lahan Pakan Ternak Sapi Perah | 86 |
| Gambar 12. Pos Penampungan Susu Sapi Perah Desa Kandangan..... | 87 |
| Gambar 13. Proses Distribusi Susu Sapi Perah | 88 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No | Judul |
|----|---|
| 1 | Pedoman Wawancara |
| 2 | Foto Dokumentasi Penulis |
| 3 | Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang |
| 4 | Curriculum Vitae Penulis |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara setiap masyarakatnya dan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Upaya – upaya untuk tercapainya kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari – hari seringkali disebut sebagai upaya “pembangunan”. Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi (Theresia et.al.,2015:1).

Pembangunan pada dasarnya telah menjadi tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara dan pembangunan berjalan berkesinambungan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya

mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya (Himpuni,2008).

Pemerintah memegang peranan yang cukup dominan dalam pembangunan. Terdapat beberapa peran yang dijalankan pemerintah, antara lain selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri dari kegiatan pembangunan tertentu (Siagian,2012:42). Namun dalam pembangunan tidak hanya pemerintah yang mengambil peran tetapi perlu juga di imbangi dengan masyarakat dan pihak swasta.

Pembangunan berkaitan erat dengan pemberdayaan, pemberdayaan merupakan model pembangunan yang menitik beratkan pada sumber daya manusia yang bersama menjadi subjek pembangunan, berkaitan dengan hal itu Mardikanto dan Soebianto (2013:32) menjelaskan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, akan tetapi dijadikan sebagai subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Sedangkan menurut Shardlow (1998) dikutip oleh Rukminto Adi (2008:78) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan diwilahnya sendiri yang memiliki potensi ekonomi untuk

dikembangkan, sebab pengembangan potensi ekonomi masyarakat juga merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah urusan otonomi daerah. Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 (5) disebutkan bahwa “Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan”. Artinya bahwa otonomi daerah merupakan suatu hak, kewenangan dan kewajiban yang mendukung pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri serta memberikan pemberdayaan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya sesuai dengan kondisi dan keadaan masing – masing daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Terlebih dengan adanya otonomi daerah dan dengan asumsi bahwa yang lebih mengetahui kondisi dan keadaan suatu daerah adalah daerah itu sendiri bukan pemerintah pusat, maka suatu daerah dituntut untuk mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal dan semata – mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengembangan potensi ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor peternakan. Sektor peternakan merupakan bidang usaha yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan akan produk – produk hasil peternakan sebagai penyedia protein, energi, vitamin dan mineral bagi manusia saat ini

semakin meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi guna meningkatkan kualitas hidup. Hal tersebut dikarenakan kandungan gizi hasil ternak dan produk olahannya sampai saat ini diketahui mempunyai nilai yang lebih baik dibandingkan dengan kandungan gizi yang berasal dari tumbuhan.

Permintaan yang tinggi akan hasil produk dari peternakan menyebabkan peternakan menjadi sektor yang memiliki peluang sangat besar untuk dikembangkan sebagai usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu produk hasil peternakan adalah susu, yang dihasilkan oleh sapi perah dan merupakan salah satu komoditi utama dari sektor peternakan. Menurut Girisonta (1995:14), dari berbagai produk yang dihasilkan, susu merupakan salah satu produk hasil peternakan yang memiliki kandungan gizi tinggi. Susu sapi mengandung semua bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan manusia sebab susu sapi merupakan sumber protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitamin. Oleh karena pentingnya manfaat susu sapi bagi pertumbuhan manusia serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, maka hal tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi peternak sapi perah untuk tetap bisa memenuhi permintaan susu sapi yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Tabel 1. Jumlah Populasi Sapi Perah, Produksi Susu Sapi Perah dan Konsumsi Susu Nasional Periode 2006 - 2012

| Tahun | Populasi Sapi Perah (ekor/tahun) | Produksi Susu Sapi Perah (ekor/tahun) | Konsumsi Susu (ton/tahun) |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 2006 | 369.000 | 616.549 | 2.534.960 |
| 2007 | 374.000 | 567.700 | 2.555.270 |
| 2008 | 458.000 | 647.000 | 2.125.330 |
| 2009 | 475.000 | 827.200 | 2.277.200 |
| 2010 | 488.000 | 909.500 | 2.345.000 |
| 2011 | 603.852 | 974.694 | 2.964.000 |
| 2012 | 611.939 | 1.017.930 | 3.120.000 |

Sumber: Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dari data yang telah disajikan diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi peningkatan produksi susu secara nasional dari tahun ke tahun, namun peningkatan produksi susu sapi tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan konsumsi susu sapi secara nasional. Perbedaan peningkatan produksi susu dengan konsumsi susu sangatlah tinggi, sehingga kebutuhan akan susu di Indonesia masih belum terpenuhi secara maksimal. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah harus mengimpor susu dari negara lain. Jika impor susu terus berlanjut bukan tidak mungkin akan berdampak pada harga susu domestik dan akan memperlambat daya saing usaha ternak sapi perah di Indonesia.

Di Indonesia provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki populasi ternak sapi perah terbesar di Indonesia. Berikut data tabel populasi sapi perah di Indonesia.

Tabel 2. Populasi Sapi Perah Menurut Provinsi, 2012 - 2016

| Provinsi | Populasi Sapi Perah menurut Provinsi (Ekor) | | | | |
|------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Jawa Timur | 308.841 | 222.910 | 245.246 | 255.947 | 264.905 |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jawa Tengah | 154.398 | 103.794 | 122.566 | 134.670 | 137.434 |
| Jawa Barat | 136.054 | 103.832 | 123.140 | 116.400 | 119.287 |
| DI. Yogyakarta | 3.934 | 4.326 | 3.990 | 4.044 | 4.066 |
| DKI Jakarta | 2.775 | 2.686 | 2.638 | 2.433 | 2.603 |
| Provinsi Lainnya | 5.938 | 6.718 | 4.936 | 5.154 | 5.565 |
| Indonesia | 611.939 | 444.266 | 502.516 | 518.649 | 533.860 |

Sumber: Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dari data yang telah di paparkan oleh Ditjen PKH pada tahun 2017 maka dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan susu sapi perah menginkat kebutuhan susu nasional pada tahun 2017 mencapai 4.448 juta ton (BPS,2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha ternak sapi perah perlu terus dikembangkan karena masih belum bisa memenuhi kebutuhan susu sapi perah. Adapun beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar pada peternakan sapi perah, salah satunya yaitu pada Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki prospek yang baik untuk meningkatkan peternakan sapi perahnya. Daerah penghasil susu segar di Kabupaten Lumajang salah satunya terdapat di Kecamatan Senduro yang menjadi kecamatan terbesar populasi ternak sapi perahnya. Berikut tabel yang menunjukkan bahwa kecamatan Senduro memiliki populasi ternak sapi perah terbesar di kabupaten Lumajang.

Tabel 3. Data Populasi Ternak Besar Kab. Lumajang

Periode : Tribulan II Tahun 2017

| NO | Kecamatan | Jenis Ternak | | | |
|----|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| | | Sapi Potong | Sapi Perah | Kerbau | Kuda |
| 1 | Tempursari | 732 | 0 | 365 | 0 |
| 2 | Pronojiwo | 1.669 | 36 | 73 | 0 |
| 3 | Candipuro | 5.928 | 0 | 1.895 | 8 |
| 4 | Pasirian | 16.610 | 0 | 409 | 63 |
| 5 | Tempeh | 15.865 | 0 | 94 | 13 |
| 6 | Lumajang | 559 | 8 | 99 | 6 |
| 7 | Sumbersuko | 4.758 | 10 | 93 | 14 |
| 8 | Tekung | 4.328 | 57 | 25 | 8 |
| 9 | Kunir | 19.792 | 43 | 150 | 15 |
| 10 | Yosowilangun | 15.745 | 4 | 9 | 25 |
| 11 | Jatiroto | 4.091 | 0 | 192 | 21 |
| 12 | Rowokangkung | 5.267 | 1 | 50 | 0 |
| 13 | Randuagung | 11.389 | 2 | 350 | 85 |
| 14 | Sukodono | 1.145 | 0 | 82 | 2 |
| 15 | Padang | 9.493 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Senduro | 2.826 | 4.850 | 0 | 43 |
| 17 | Pasrujambe | 2.048 | 0 | 97 | 94 |
| 18 | Gucialit | 6.973 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Klakah | 9.929 | 10 | 0 | 28 |
| 20 | Kedungjajang | 8.384 | 4 | 36 | 8 |
| 21 | Ranuyoso | 25.565 | 0 | 0 | 27 |
| | JUMLAH | 173.096 | 5.025 | 4.019 | 466 |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2017

Dari data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kecamatan Senduro menjadi sentral ternak sapi perah, terdapat tiga desa yang menjadi sentral ternak sapi perah tersebut yaitu desa Burno sebesar 482 ekor, desa Kandangtepus sebesar 1924 ekor dan desa Kandangan sebesar 791 ekor (UPTD Pertanian, 2016).

Meskipun kecamatan Senduro menjadi sentral peternakan sapi perah di kabupaten Lumajang namun kabupaten Lumajang masih belum bisa bersaing dengan wilayah lain yang ada di Jawa Timur seperti kabupaten Pasuruan dan

Malang yang menjadi wilayah terbesar populasi ternak sapi perahnya di Jawa Timur. Hal tersebut juga disampaikan oleh sekretaris KUD.Tani Makmur di Senduro yang mengatakan bahwa jumlah kebutuhan susu sapi perah di Jawa Timur sebesar 2 juta liter per hari namun hanya terpenuhi sebesar 1 juta liter perhari dan kecamatan Senduro hanya memasok sebesar 203.400 liter perhari. Sehingga angka tersebut jauh dari kebutuhan padahal kecamatan Senduro merupakan wilayah yang sangat mendukung untuk perkembangan usaha ternak sapi perah karena didukung oleh faktor geografis yang baik. Sehingga tentu ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa peternakan sapi perah di kabupaten Lumajang masih belum maksimal. Peternak sapi perah khususnya di kecamatan Senduro kabupaten Lumajang perlu diberikan pendampingan yang lebih intens karena usaha ternak sapi perah membutuhkan keahlian dan keterampilan. Keahlian dan keterampilan dalam usaha ternak sapi perah berguna untuk mengembangkan usaha ternak sapi perah tersebut sehingga usaha ternak sapi perah di kecamatan Senduro lebih berkembang.

Berdasarkan dari masalah tersebut maka diperlukan upaya dari pemerintah untuk membantu mengembangkan usaha ternak sapi perah melalui pemberdayaan. Sehingga penulis menetapkan judul penelitian **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah Studi di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”**.

B. Rumusan Masalah

Berawal dari hal – hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, penulis mencoba mengkaji permasalahan yang terkait dengan hal – hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun pertanyaan yang ingin dikaji dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan peternak sapi perah di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?
2. Faktor – faktor apa saja yang mendukung dan menghambat strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan peternak sapi perah di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan berbagai pertanyaan dalam perumusan masalah sebagaimana dirumuskan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan peternak sapi perah di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan peternak sapi perah di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis, yaitu meliputi:

1. **Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan peternak sapi perah untuk meningkatkan perekonomian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi pemerintah khususnya bagi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dalam strategi meningkatkan peran dan partisipasi pemerintah dalam pemberdayaan peternak sapi perah.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan kajian ilmu administrasi pada umumnya dan ilmu administrasi publik pada khususnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi penelitian – penelitian yang akan datang terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini dibuat agar pembaca dengan mudah dapat memahami isi dan makna yang terkandung serta memahami maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang penelitian mengenai alasan yang mendasar penulis untuk menganalisis Strategi Pemerintah

Daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah. Selain itu pada bab ini juga akan berisi rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori – teori atau temuan ilmuwan dari buku, jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun teori – teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori yang berhubungan dengan strategi pemerintah daeran dan pemberdayaan peternak sapi perah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian yang mengemukakan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis, kemudian lokasi dan situs penelitian tempat penelitian dilaksanakan dan sumber data yang akan digunakan penelitian. Pengumpulan data yang menyangkut bagaimana penulis memperoleh data dan analisis data yang mengemukakan bagaimana penulis memerlukan data yang diperoleh dengan mengelompokkan data sehingga siap dianalisis serta metode analisis yang dilakukan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari lokasi penelitian, penyajian data dan gambaran umum lokasi penelitian serta analisis data.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil temuan pokok penelitian dan memberikan saran sebagai bahan perbaikan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah di Indonesia terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya pemerintah daerah melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip – prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah menurut Domai (2011:6) “Pemerintah Daerah adalah pelaksana fungsi – fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”. Sedangkan dalam Undang –

Undang nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah adalah “kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Sehingga yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah daerah oleh pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Urusan Pemerintah Daerah

Usuran pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 11 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang bersifat wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pemerintah Daerah, Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan rakyat
- f. Sosial

Sedangkan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal

12 Ayat (2) tentang Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan catatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan dan
- r. Kearsipan

Urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat (3) tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian dan
- h. Transmigrasi

Sesuai dengan uraian diatas, maka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat juga merupakan prioritas dari urusan pemerintah daerah. Sehingga dalam implementasinya pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pemberdayaan secara maksimal kepada peternak sapi perah agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan peternak sapi perah.

3. Fungsi Pemerintah Daerah

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi yang lebih kompleks. Musgrave dan Musgrave (1991) dalam Muluk (2009:113) mengungkapkan bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

a. Fungsi Alokasi

Fungsi Alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan *public goods*, atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan dengan baik sebagai *private* maupun *public goods* dan menentukan komposisi dari *public goods*. Selain itu, fungsi alokasi dapat menggunakan fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara untuk kemudian dialokasikan untuk pengeluaran rutin negara. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

b. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Selain itu, pemerintah bertanggungjawab untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hanya negara yang bisa “memaksa” golongan masyarakat kaya untuk menyisihkan penghasilannya dengan mewajibkan mereka membayar pajak sesuai dengan kemampuannya.

c. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat dan mempertimbangkan dampaknya bagi perdagangan dan keseimbangan pembayaran.

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut maka pemerintah diharapkan lebih mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan serta dapat tercapainya tujuan negara. Lebih lanjut fungsi pemerintah adalah dimana setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara ini mempunyai tugas dan wewenang masing – masing.

4. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Peternakan

Peranan merupakan asal kata dari peran yang berarti sesuatu yang memegang pimpinan yang utama. Peranan atau *role* sering diartikan sebagai suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu. Hubungan peranan dalam pemerintahan daerah adalah antara tugas dan wewenang pemerintah yang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu agar pemerintah mendapatkan apa yang ingin dicapai, maka pemerintah harus menjalankan peranannya dengan baik. Soerjono (2012:212) menjelaskan bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis sebuah kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan sebuah peranan.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam

masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Soerjono (2013:213) memberikan penjelasan bahwa sebuah peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Peranan dimaksudkan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan aktif dalam suatu pencapaian yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Perlu pula disinggung perihal fasilitas – fasilitas bagi peranan individu (*role-facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas – fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga – lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang – peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas – fasilitas bertambah.

Otonomi daerah memberikan peran terhadap pemerintah daerah agar dapat memberikan peranannya dalam membuka dan memajukan daerahnya berdasarkan potensi yang dimilikinya. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi dasar tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Pemberdayaan peternak di wilayah daerah menjadi wewenang pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pemerintahan. Maka dari itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak menjelaskan tentang peran pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan peternak sebagai berikut:

- a. Akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi
- b. Pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan dan bantuan teknik
- c. Penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi
- d. Pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha
- e. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kewirausahaan
- f. Pemanfaatan sumberdaya dalam negeri
- g. Kawasan usaha peternakan
- h. Promo dan pemasaran
- i. Perlindungan harga ternak dan produk hewan

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bagi para pelaku kegiatan peternakan pada peran pemerintah ialah memberikan pemberdayaan. Untuk itu kegiatan pemerintah daerah dalam memberdayakan peternak harus memberikan dorongan yang berupa bantuan terkait dengan kegiatan – kegiatan peternakan agar tetap tercipta kesejahteraan pada peternak.

B. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa Yunani. Sebagai kata benda, *strategos* yang merupakan gabungan dari kata *stratos* yang berarti militer dan *ago* yang berarti memimpin. Sebagai kata kerja, *stratego* berarti merencanakan. Menurut Siagian (2012:17) pengertian strategi adalah suatu rencana berskala besar yang berorientasi pada jangkaun masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan

lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya siarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan. Sedangkan menurut pendapat Wit dan Mayer yang dikutip dalam Anni, dkk (2013:6) mengatakan bahwa strategi harus dilihat dan dipahami berdasarkan tiga dimensi, yaitu *process*, *content* dan *context*.

a. *Strategy Process*

Cara bagaimana strategi – strategi timbul, dimana letak strategy process (proses strategi). Proses strategi menyangkut bagaimana, siapa dan bilamana strategi itu sendiri; bagaimana strategi tersebut dan bagaimana seharusnya strategi itu dibuat, dianalisis, dibentuk, diformulasi, diimplementasi, diubah dan dikontrol; siapa yang tersangkut; kapankah kegiatan – kegiatan yang diperlukan dilaksanakan.

b. *Strategy Content*

Hasil atau produk proses strategi disebut *strategy content*. Jika dinyatakan sebagai sebuah pernyataan, *strategy content* berhubungan dengan apa dari strategi, apa itu strategi dan bagaimana isi yang seharusnya dari strategi tersebut bagi perusahaan serta untuk unitnya masing – masing.

c. *Strategy Context*

Sekumpulan keadaan berbagai proses strategi dan *strategy content* ditentukan disebut *strategy context*. Bila dinyatakan sebuah pertanyaan, *strategy context* tersebut terkait dengan dimana strategi berada; diperusahaan mana dan di lingkungan apa proses strategi dan *strategy content* itu ada.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah kiat – kiat dalam menentukan suatu rencana untuk masa depan dengan memperhatikan kondisi dan faktor lingkungan yang sesuai dengan sumber data yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi ataupun instansi membutuhkan suatu strategi untuk menyusun rencana – rencana yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Penentuan strategi harus didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai dalam suatu organisasi supaya strategi yang dibuat nantinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan.

2. Manfaat Strategi

Penetapan suatu strategi memberikan manfaat yang baik bagi masa depan suatu strategi. Dalam menentukan sebuah strategi dibutuhkan strategi yang tepat sehingga akan mampu mencapai sasaran yang diinginkan oleh suatu organisasi atau instansi. Manfaat penetapan strategi pada organisasi menurut Siagian (2002:206) sebagai berikut:

- a. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan dengan mengidentifikasi lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola hal – hal yang ada dimasa mendatang
- b. Strategi merupakan suatu cara yang efektif untuk merealisasikan kegiatan dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan
- c. Sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang
- d. Mengetahui berbagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan pada suatu bidang sesuai kemampuan yang dimiliki secara konkret dan jelas
- e. Sebagai proses penyelesaian permasalahan melalui serangkaian proses pengambilan keputusan
- f. Untuk mempermudah koordinasi bagi semua pihak yang berpartisipasi dan mempunyai persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, interdependensi dan interelasi yang harus tumbuh dan terpelihara dalam mengelola jalannya roda organisasi, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara berbagai pihak terkait. Dengan demikian strategi dapat berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan.

Pada dasarnya tujuan dari penetapan strategi yaitu supaya proses dalam pengambilan keputusan terencana dengan baik dan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama serta sebagai pedoman bagi organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan secara efektif. Manfaat

penetapan strategi akan dapat dirasakan oleh suatu organisasi baik dari segi internal maupun segi eksternal organisasi.

3. Jenis – Jenis Strategi

Menurut Korten yang dikutip oleh Salusu (2002:104-105) yang menyatakan bahwa jenis – jenis strategi dianggap sebagai suatu hierarki.

Jenis – jenis strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)
Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai – nilai dan inisiatif – inisiatif strategik yang baru. Pembatasan – pembatasan diperlukan yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa
- b. *Program Strategy* (Strategi Program)
Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi – implikasi strategik dari suatu program tertentu. Apa kira – kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi
- c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)
Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber – sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kerja kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya
- d. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)
Fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif – inisiatif strategik.

4. Manajemen Strategi

Menurut Salusu (2006:492-493) manajemen strategi adalah suatu cara memimpin organisasi untuk mencapai misi, tujuan, dan sasarannya. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan manajerial, tanggungjawab organisasional, sistem administrasi yang baik, yang dapat menghubungkan pengambilan keputusan strategi dengan pengambilan keputusan operasional, pada semua tingkatan hierarki organisasi dan pada semua jajaran kewenangan fungsional dalam organisasi.

Manajemen strategi adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai.

David (2009:6) mengatakan proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- a. Perumusan strategi yang mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi – strategi alternatif dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan
- b. Penerapan strategi yang seringkali disebut “tahap aksi” dari manajemen strategi dimana penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya upaya – upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan informasi
- c. Penilaian strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar adalah: (1) peninjauan ulang faktor – faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi – strategi saat ini (2) pengukuran kinerja (3) pengambilan langkah koreksi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan strategi dalam manajemen strategi merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan. Karena pada dasarnya dalam mencapai suatu tujuan dibutuhkan pertimbangan dan perencanaan yang sangat matang. Untuk itu dalam sebuah organisasi diperlukan visi serta misi yang ingin dicapai serta menerima koreksi atas kritik dan saran untuk mencapai suatu manajemen strategi yang baik.

5. Rencana Strategi

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun kedepan. RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala yang lebih rendah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD dapat dilihat sebagai dokumen rencana yang mencoba untuk mengeksplorasi kemungkinan – kemungkinan perkembangan, kecenderungan dan perubahan dari berbagai faktor eksternal dan internal dimasa depan; memperkirakan pengaruhnya terhadap pengembangan daerah masa depan; mencoba memproyeksikan arah perjalanan pembangunan daerah hingga 20 tahun kedepan untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dan; merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk memanfaatkan peluang seoptimal

mungkin dan mengatasi kendala serta ketidakpastian seefektif mungkin.

Perencanaan jangka panjang 20 tahun akan sangat banyak dipengaruhi oleh banyak ketidakpastian atau yang tidak dapat diprediksi. Kualitas dokumen RPJPD akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan membaca dan mengeksplorasi kecenderungan perubahan – perubahan yang diperkirakan akan terjadi dimasa depan. Untuk ini pendekatan perencanaan strategis berbasis *scenario planning* sangatlah diperlukan dalam penyusunan RPJPD. Perencanaan strategis berbasis *scenario planning* adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan, dan tindakan diberbagai peringkat organisasi; sifat garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis berbasis *scenario* perlu melibatkan *stakeholders* untuk memastikan terdapat perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; meninjau mana strategi yang berhasil dan tidak; dan diantara strategi tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis berbasis *scenario* menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya; mencoba memetakan arah perjalanan pembangunan daerah; apa yang hendak dicapai pada masa 20 tahun mendatang; bagaimana tahapan

mencapainya dan langkah – langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Namun dokumen RPJPD juga harus memiliki komitmen pemerintah terhadap tujuan – tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals, Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih dan sanitasi, dan sebagainya.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daeah terpilih. RPJMD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka dokumen RPJMD akan mencerminkan sejauh mana kredibilitas Kepala Daerah terpilih dalam memandu, mengarahkan dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan pembangunan daerahnya dalam masa 5 tahun kedepan dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya.

RPJMD menjawab 3 pertanyaan dasar:

- (1) Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang
- (2) Bagaimana mencapainya dan
- (3) Langkah – langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi

RPJMD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah terpilih kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas serta tolak ukur kinerja pencapaiannya.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen RPJMD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan RPJMD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis.

c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Karena penyusunan dokumen Renstra SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi

(TUPOKSI) SKPD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah selama masa kepemimpinannya. Dalam konteks ini, sangat penting bagi Renstra SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas SKPD serta tolak ukur pencapaiannya.

d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 tahun kedepan. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RKPD dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan *review* atas implementasinya. RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. RKPD menghubungkan rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.

e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Renja SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstrs SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaanya.

f. Kajian Rencana Strategi 5W1H

Menurut G.R.Terry unsur manajemen ada 4 yaitu : POAC. Perencanaan pengawasan merupakan unsur manajemen. Perencanaan adalah keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan dan siapa yang akan melakukan. Unsur administrasi ada 7 yaitu:

- (1) Organisasi adalah: kumpulan orang yang saling berkerjasama dan mempunyai tujuan yang sama

(2) Manajemen adalah: pengaturan orang – orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

(3) Keuangan

(4) Kepemimpinan adalah: kemampuan seseorang untuk menggerakkan orang lain untuk berkerjasama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan

(5) Humas

(6) Perbekalan

(7) Tata usaha

Ada suatu target yang akan dicapai yaitu program. Didalam suatu perencanaan ada 5w dan 1h yaitu: what, where, who, when, why dan how. 3 kegiatan yang dilakukan didalam perencanaan yaitu:

(1) Kegiatan pokok apa yang akan dilakukan secara langsung dikerjakan pada pencapaian tujuan yang akan dicapai

(2) Kegiatan yang menunjang aktivitas yang mendukung tujuan tersebut

(3) Kegiatan veterial: kegiatan yang tidak menunjang tetapi tidak sering dihindarkan yaitu ppl dan pkl.

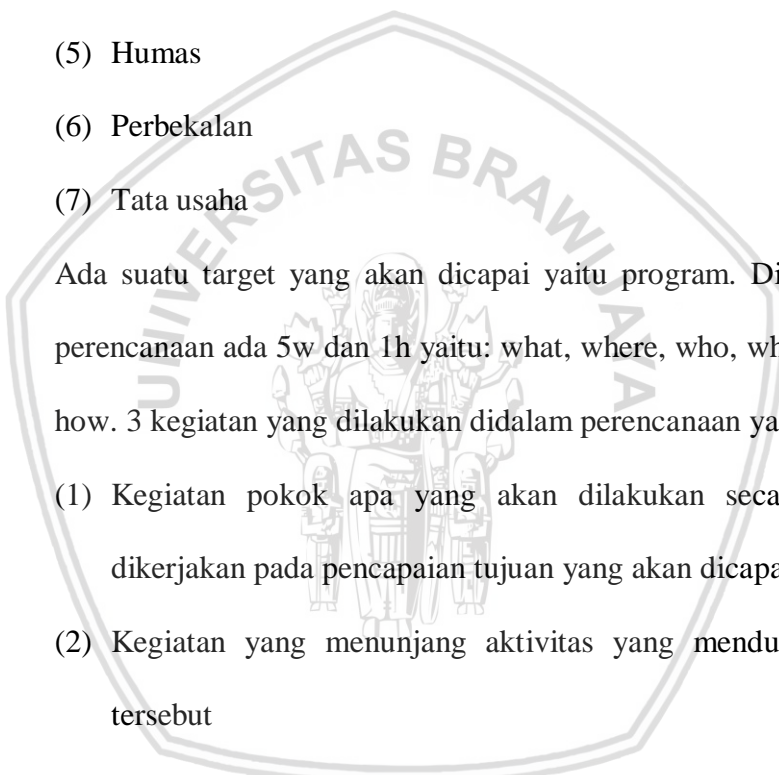
(1) What:

a. Apa yang akan dilakukan atau dikerjakan.

b. Sumber dana yang didapat.

c. Dana apa yang akan dihubungkan.

d. SDM



e. Sarana dan prasarana agar tercapai.

(2) Where:

- a. Dimana kita melakukan kegiatan.
- b. Berpegang kepada aspekabilitas (kemampuan untuk menyelesaikan diri).
- c. Tersedianya tenaga kerja yang memenuhi berbagai persyaratan guna menjamin kelancaran tugas.

(3) When:

- a. Kapan kita melakukan tugas.
- b. Kemampuan untuk mengelola waktu.
- c. Memilih waktu yang tepat untuk mengisi waktu luang.

(4) Who:

- a. Menganalisis kebutuhan tenaga kerja baik kuantitatif maupun kualitatif.
- b. Pola pembinaan karier.
- c. Kebijaksanaan didalam pengolahan dan pengkajian.
- d. Metode dan teknik tentang pengadaan tenaga kerja yang akan dilaksanakan.

(5) Why:

- a. Rencana itu harus mempermudah suatu pekerjaan sehingga mudah dilaksanakan.
- b. Rencana itu harus mempunyai rincian yang cermat.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai :”berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai cara untuk melakukan sesuatu, kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak”. Pemberdayaan yakni: *Empowerment* / pemberdayaan asal dari kata *power* yang artinya “*control, authority, dominion*”. Empowering artinya *is passing an authority an responsibility*, yaitu lebih berdaya daripada sebelumnya dalam arti wewenang dan tanggungjawabnya termasuk kemampuan individual yang dimilikinya (Sedarmayanti,2004:285).

Menurut Suhendra (2006:74-75), pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolitif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya.

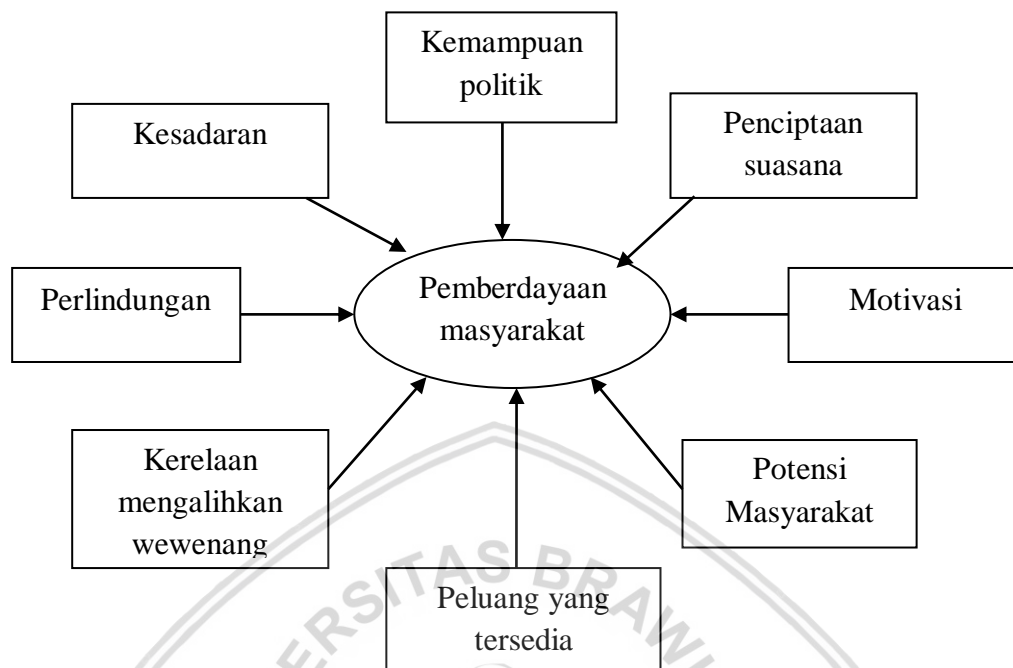
Pemberdayaan sebagai suatu proses berarti serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan suatu kelompok lemah dalam masyarakat. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan berarti menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki

kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu – individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan dimaksudkan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang berupa fisik, ekonomi maupun sosial.

Adapun unsur – unsur pemberdayaan masyarakat (Suhendra,2006:87) diantaranya adalah:

- a. Kemampuan politik yang mendukung
- b. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh
- c. Motivasi
- d. Potensi masyarakat
- e. Peluang yang tersedia
- f. Kerelaan mengalihkan wewenang
- g. Perlindungan
- h. Kesadaran



Gambar 1. Unsur – Unsur Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Suhendra (2006:87)

Berdasarkan gambar diatas, makna hakiki pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan; (2) meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni yang bersifat *people centered, participatory, empowering and sustainable* (masyarakat yang terpusat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan).

2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Sulistyani (2004:80) tujuan dari pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat agar menjadi mandiri. Yang dimaksud disini mandiri dalam berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang dilakukan saat ini. Maka dari itu, untuk menjadi seorang yang mandiri diperlukan dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan efektif.

Sedangkan menurut Theresia et.al. (2015:153) tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Perbaikan kelembagaan
Dengan perbaikan kegiatan / tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaikan usaha
Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan pendapatan
Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- d. Perbaikan lingkungan
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaikan kehidupan
Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaikan masyarakat
Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Model – Model Pemberdayaan

Menurut Suryono (2010:264) model pemberdayaan masyarakat adalah suatu alternatif, pola acuan, macam – macam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemamdirian seseorang atau suatu lembaga, sehingga nantinya mampu mengembangkan kemampuannya secara optimal.

Ada beberapa macam model pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Model People Centre Development*
Model pembangunan kualitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya. Model ini mencoba mengangkat martabat manusia sebagai mana mestinya sebagai makhluk yang memiliki harga diri, memiliki kemampuan intelegensi dan sekaligus memiliki perasaan. Manusia tidak dapat disamakan dengan alat produksi untuk melipatgandakan hasil semata, melainkan manusia hendaknya dihargai dan dihormati, dengan cara meningkatkan kualitas SDM-nya sehingga akan menempatkan manusia pada martabat yang lebih baik dan layak.
- b. *Model Lingkungan Setan Kemiskinan*
Asumsi dasar dari model ini adalah “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu karena dia memang miskin). Kemiskinan itu merupakan lingkaran yang disebutnya dengan lingkaran kemiskinan yang mengemukakan bahwa kemiskinan diawali adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan rendahnya invetasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.
- c. *Model Kemitraan*
Kemitraan dilihat dari kaca etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling menumbuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Tujuan kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra.

d. Model *Garmeen Bank*

Model ini berasal dari contoh pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Bangladesh *Garmeen Bank* yang memberikan pelayanan program pengentasan kemiskinan pada masyarakat. *Garmeen Bank* memberikan kredit kepada masyarakat tanpa agunan dan menciptakan sistem perbankan yang berbasis pada saling kepercayaan, akuntabilitas, partisipasi dan kreativitas.

e. Model Sri Mahila Sewa Sahakari Bank

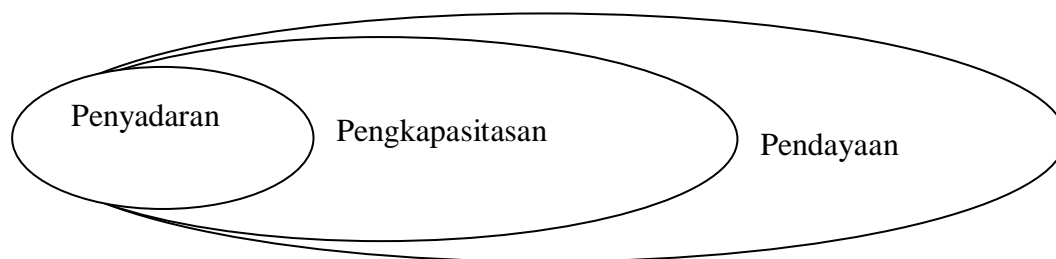
Model ini diterapkan oleh Sri Mahila Sewa Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan akses keuangan terhadap wanita – wanita yang lemah dan miskin. Peminjaman hanya dilakukan untuk kegiatan ekonomi bukan untuk keperluan pribadi (konsumtif). Bank memperkerjakan dan mendorong dengan menabung melalui bank tersebut.

f. Model Sistem Tanggung Renteng (*Multipler Effect*)

Model ini pada umumnya banyak diadopsi oleh para pengelola koperasi di Indonesia, khususnya pengelola koperasi simpan pinjam yang pada dasarnya merupakan upaya penguatan kelompok dalam berinteraksi antar manusia atau antar para anggotanya. Dengan menggunakan prinsip – prinsip, yaitu: sistem tanggung renteng merupakan upaya memperbaiki kualitas manusia melalui interaksi antar manusia dalam kelompok menuju manusia berkualitas, kelompok tanggung renteng mengembangkan nilai – nilai umum dan nilai – nilai khusus yang sesuai dengan nilai – nilai yang dimiliki koperasi.

4. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut (Wrihatnolo & Nugroho, 2007:2)



Gambar 2. Tahap Pemberdayaan

Sumber: Wrihatnolo & Nugroho (2007:3)

- a. Tahap Pertama adalah Penyadaran
Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.
Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “demand”) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang lain).
- b. Tahap Kedua adalah Pengkapasitasan
Inilah yang sering disebut dengan capacity building, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang hendak diotonomkan diberi program pemampuan atau capacity building untuk membuat mereka “cakap” (skilfull) dalam mengelola otonomi yang diberikan. Proses capacity building terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai.
- c. Tahap Ketiga adalah Pemberian Daya Itu Sendiri atau Empowerment
Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

5. Pendekatan Pemberdayaan

Menurut Cook dan Macaulay (1997) yang dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010:95-97) menjelaskan delapan langkah yang harus dilakukan menuju pemberdayaan agar berhasil, antara lain sebagai berikut:

- a. Hubungan pemberdayaan dengan visi dan nilai
Jika pemberdayaan tidak dipandang sebagai tiang penyangga visi organisasi, maka masyarakat akan memandangnya sebagai tindakan iseng atau kehilangan konteksnya sejak awal. Pemberdayaan harus menjadi bagian awal dari nilai kemasyarakatan, sehingga dianggap sebagai salah satu faktor keberhasilan;
- b. Diarahkan dengan menggunakan contoh – contoh
Para pemimpin dapat memberikan visi untuk masa mendatang dan memberikan dukungan serta dorongan yang sangat penting untuk

- menciptakan suatu lingkungan dimana orang – orang bertanggungjawab atas nasib mereka;
- c. Berkomunikasi secara aktif
Dengan cara melibatkan masyarakat didalam komunikasi dan pembahasan umpan balik secara tetap, maka akan mendorong terjadinya pemberdayaan;
 - d. Meninjau struktur organisasi
Pemberdayaan yang berhasil memerlukan perubahan yang terjadi di dalam struktur, sehingga para individu bisa menjadi lebih dekat kepada titik keputusan, dan birokrasi dapat dibuang melalui rantai pengawasan yang lebih kecil;
 - e. Memperkuat tim kerja
Pemberdayaan membutuhkan dukungan. Kerja tim yang memiliki pemberdayaan adalah salah satu mekanisme terkuat untuk menyediakan suatu lingkungan bagi pengambilan inisiatif dan kadang – kadang berbuat kesalahan, tetapi juga untuk belajar darinya;
 - f. Mendorong pengembangan pribadi
Orang memerlukan bantuan dan dorongan untuk membentuk rasa percaya diri mereka didalam membuat suatu keputusan sendiri, hal ini berarti bukan saja memberikan pelatihan kepada orang – orang tersebut untuk berperan lebih banyak tetapi juga untuk mendemonstrasikan rasa percaya dan rasa hormat kepada individu tersebut;
 - g. Menjadikan jasa layanan kepada pelanggan sebagai fokus
Hasil akhir dari pemberdayaan seringkali berupa naiknya tingkatan jasa layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, karyawan garis depan dan karyawan yang berhubungan dengan pelanggan internal harus di dorong untuk bertanggungjawab memuaskan pelanggan mereka;
 - h. Ukur pengembangan yang terjadi dan kenali serta hargailah keberhasilan. Sebelum memulai pemberdayaan, suatu organisasi perlu menentukan ukuran keberhasilan dan membantu agar ukuran ini dapat dipahami dan disepakati oleh setiap orang.

6. Strategi Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya memiliki arah dan tujuan yang jelas serta harus dicapai. Untuk itu setiap kegiatan pemberdayaan memerlukan arah dan tujuan demi keberhasilan yang diinginkan. Sehingga Mardikanto dan Soebianto (2013:168) menjelaskan bahwa pada dasarnya pemberdayaan masyarakat memiliki tiga arah

tujuan yaitu, pertama pemihakan dan peberdayaan masyarakat, kedua pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat, dan ketiga moderniasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Selain itu, Suharto (1997) dalam Mardikanto dan Soebianto (2013:171-172) menjelaskan bahwa terdapat lima aspek pemberdayaan yang dapat dilakukan melalui lima strategi pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyongkongan dan Pemeliharaan, adapun berikut penjelasannya:

- a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat – sekat kultural dan struktural yang menghambat
- b. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka
- c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok – kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah serta mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil
- d. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas – tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan
- e. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan batasan guna perlindungan dari kegiatan pemberdayaan untuk tercapainya keinginan dari pemberdayaan itu sendiri. Maka dari itu, Priyono (1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2013:170) menyebutkan bahwa terdapat lima strategi pemberdayaan yang terdiri dari :

- a. Pengembangan sumber daya manusia
Dalam hal ini, para petani di dorong untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan keterampilannya dalam berusaha tani, sehingga mereka tidak kalah bersaing.
- b. Pengembangan kelembagaan
Diperlukannya suatu program untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta efektivitas kelembagaan dan kelompok tani dalam peranannya untuk mendukung usaha para petani.
- c. Pemupukan modal masyarakat
Kendala yang sering dihadapi oleh para petani adalah kurangnya modal yang mereka miliki dan sulitnya dalam memperoleh modal untuk usaha mereka. Sehingga perlu adanya program yang dapat membantu petani dalam memperoleh dan mengelola modal tersebut untuk usahanya.
- d. Pengembangan usaha produktif
Dalam hal ini adalah bagaimana memberdayakan petani agar mereka mampu mengembangkan usaha taninya menjadi lebih produktif dan efisien. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka.
- e. Penyediaan informasi tepat guna
Teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengembangkan usaha para petani. Oleh karena itu, perlu adanya ketersediaan teknologi dan informasi secara tepat guna yang dapat mereka manfaatkan secara optimal.

Selain itu, Undang – Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada pasal 7 ayat (3) menjelaskan terkait dengan beberapa strategi pemberdayaan yaitu:

- a. Pendidikan dan pelatihan

- b. Penyuluhan dan pendampingan
- c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil
- d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian
- e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan
- f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi
- g. Penguatan kelembagaan

Bertolak dari pemahaman strategi pemberdayaan masyarakat, Mardikanto dan Soebianto (2013:168) menjelaskan bahwa sebagai upaya untuk memperbaiki usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai syarat pembangunan, maka lingkup pengenalan wilayah kerja pemberdayaan setidaknya – tidaknya harus mencakup:

- a. Keadaan sumber daya alam, bagaimanapun harus diakui bahwa sebagian besar masyarakat penerima manfaat pemberdayaan masih hidup dalam usaha konvensional yang sangat tergantung terhadap keadaan alam, sehingga pengenalan terhadap sumber daya alam perlu di perhatikan. Adapun beberapa keadaan sumber daya alam yang perlu diperhatikan oleh penyuluh atau fasilitator berupa, lokasi geografis, topografi wilayah, iklim, jenis tanah, bencana rutin, status dan luas pemilikan lahan dan lokasi administrasi.
- b. Keadaan sumber daya manusia, penerima manfaat dari kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup masyarakat sebagai pelaku utama, sebagai pengelola usaha, tokoh masyarakat, pengusaha, pedagang, dan lain – lain. Namun adapula dalam sumber daya manusia kegiatan pemberdayaan yang perlu diperhatikan diantaranya, jumlah dan kepadatan penduduk, keragaman penduduk menurut umur dan jenis kelamin, besarnya ukuran keluarga, tingkat pertumbuhan penduduk, nilai sosial budaya dan lain sebagainya.
- c. Keadaan kelembagaan untuk pembangunan, dalam hal ini kelembagaan dibagi menjadi dua kelembagaan, yaitu lembaga ekonomi dan lembaga sosial. Lembaga ekonomi meliputi lembaga – lembaga pemasaran, penunjang kegiatan produksi, dan lain sebagainya. Sedangkan lembaga sosial meliputi kegiatan usaha kelompok tani, himpunan, kelompok masyarakat dan lain sebagainya.
- d. Keadaan saran dan prasarana bagi pembangunan, tersedianya sarana produksi di tingkat lokal, pemasaran hasil, dan pengangkutan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dari pembangunan pertanian. Adapun keberagaman sarana dan prasarana yang perlu

- diperhatikan diantaranya, keadaan bahan baku, keadaan sarana pengangkutan, keadaan pasar, keadaan jalan dan sebagainya.
- e. Kebijakan pembangunan, tanpa adanya pemahaman yang baik terhadap kebijakan dan kesepakatan – kesepakatan yang ditetapkan, dikhawatirkan program pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan akan kurang bermanfaat, berbeda atau mungkin bertentangan dengan kebijakan ataupun kesepakatan yang ada. Untuk itu, adapun beberapa kebijakan pembangunan dalam kegiatan pemberdayaan yang perlu diperhatikan, diantaranya kebijakan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), lalu kegiatan pembangunan pada ruang lingkup regional dan lokal yang meliputi arah, tujuan dan langkah – langkah kegiatan peraturan wilayah dan juga hasil musyawarah masyarakat.
 - f. Potensi ekonomi dan keunggulan lokal, untuk mampu melakukan sesuatu pemberdayaan masyarakat, fasilitator maupun penyuluh harus dapat menganalisis tentang potensi dan keunggulan lokal guna membangun daya saing dan sinergi dengan pemerintah daerah setempat. Terkait dengan hal itu maka yang perlu dicermati adalah keunggulan dan kelemahan – kelemahan dari usaha yang dilaksanakan selama ini, alternatif – alternatif peran bantuan yang diberikan dan alternatif kegiatan yang akan dilakukan oleh fasilitator.
 - g. Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat, pemahaman terkait dengan organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat dewasa ini sangat penting untuk dipahami oleh setiap fasilitator atau penyuluh, seiring telah dibentuknya beberapa institusi oleh pemerintah baik ditingkat nasional, provinsi hingga kabupaten atau kota. Sehubungan dengan hal itu adapun beberapa hal yang perlu dipahami dalam hal ini yaitu struktur organisasi pemberdayaan masyarakat tani, keterkaitan atau saling hubungan baik antara sesama fasilitator dengan masyarakat sebagai penerima manfaat, ataupun masyarakat dengan lembaga penunjang yang lainnya, rician kegiatan (*job description*) yang harus dilaksanakan, hak dan kewajiban, dan seterusnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan terdapat beberapa lingkup pengenalan wilayah kerja yaitu keadaan sumber daya alam, keadaan sumber daya manusia, keadaan kelembagaan untuk pembangunan, keadaan sarana dan prasarana, kebijakan pembangunan dan potensi ekonomi dan keunggulan lokal.

7. Indikator Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional perlu diketahui berbagai indikator pemberdayaan untuk mengetahui seseorang sudah berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dikonsentrasikan pada aspek – aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.

Schuler, Hashemi dan Hiley dalam Suharto (2005:64) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: ‘kekuasaan di dalam’ (power within), ‘kekuasaan untuk’ (power to), ‘kekuasaan atas’ (power over) dan ‘kekuasaan dengan’ (power with). Adapun indikator pemberdayaan adalah:

- a. Kebebasan mobilitas (mampu pergi sendirian ke berbagai tempat)
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil (barang kebutuhan sehari – hari)
- c. Kemampuan membeli komoditas besar (barang sekunder dan tersier)
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan – keputusan rumah tangga.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga (tidak ada tekanan dari pihak luar)
- f. Kesadaran hukum dan politik (mengetahui berita hukum dan politik)
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes – protes (mampu menunjukkan sikap protes bila diperlakukan tidak adil)
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga (mempunyai rumah, tanah, aset produktif, tabungan dan lain – lain).

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program – program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah mencakup:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin;
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia;
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya;
- d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, semakin rapihnya sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok lain di masyarakat; serta
- e. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Secara umum pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi) demokratisasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokus dari pemberdayaan ini adalah aspek lokalitas, sebab *civil society* akan merasa lebih siap diberdayakan

lewat isu – isu lokal, sangat tidak realistis apabila kekuatan – kekuatan ekonomi dan struktur – struktur di luar *civil society* diabaikan.

D. Peternakan Sapi Perah

1. Usaha Peternakan Sapi Perah

Peternakan sapi perah di Indonesia umumnya merupakan usaha keluarga di pedesaan dalam skala kecil, sedangkan usaha skala besar masih sangat terbatas dan umumnya merupakan usaha sapi perah yang baru tumbuh.

Yusdja (2005) memaparkan bahwa usaha sapi perah di Indonesia telah berkembang sejak tahun 1960 ditandai dengan pembangunan usaha – usaha swasta dalam usaha sapi perah di sekitar Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Mulai tahun 1977, Indonesia mulai mengembangkan agribisnis sapi perah ditandai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. SKB ini merumuskan kebijakan dan program pengembangan agribisnis sapi perah di Indonesia. Setidaknya terdapat dua dasar yang digunakan yakni agribisnis sapi perah dikembangkan melalui koperasi / KUD sapi perah dan pemasaran susu diatur oleh koperasi dan Industri Pengolahan Susu.

Selain itu Yusdja (2005) juga memperlihatkan bahwa industri sapi perah di Indonesia mempunyai struktur relatif lengkap yakni peternak, pabrik pakan, dan pengolahan susu yang relatif maju dan kapasitas yang cukup tinggi, dan tersedianya kelembagaan peternak yakni Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI). Sementara itu struktur produksi susu

sapi perah terdiri atas usaha besar, UB (lebih dari 100 ekor), usaha menengah, UM (30 – 100 ekor), usaha kecil, UK (10 – 30 ekor) dan usaha rakyat, UR (1 – 9 ekor). UR pada umumnya merupakan anggota koperasi. UK berkembang di Sumatera Utara, sedangkan UB dan UM berkembang di Pulau Jawa.

Namun usaha ternak sapi perah merupakan usaha yang menguntungkan dibandingkan dengan usaha ternak yang lain. Beberapa keuntungan usaha ternak sapi perah menurut Nurdin (2011) yaitu :

- a. Peternakan sapi perah termasuk usaha yang bersifat tetap, karena produksi susu dalam suatu usaha peternakan sapi perah tidak banyak bervariasi dari tahun ke tahun jika dibandingkan dengan hasil pertanian lainnya (biasanya variasi tidak lebih dari 2 persen)
- b. Sapi perah memiliki kemampuan untuk merubah bahan makanan menjadi protein hewani dan kalori dengan lebih efisien dibandingkan ternak lainnya
- c. Jaminan pendapatan (*income*) dari usaha sapi perah adalah tetap, karena sapi perah akan memproduksi setiap hari secara terus menerus sepanjang tahun
- d. Penggunaan tenaga kerja yang tetap dan tidak musiman
- e. Pakan relatif mudah didapat dan murah, karena sapi perah dapat menggunakan berbagai jenis hijauan yang tersedia atau sisa-sisa hasil pertanian
- f. Sapi perah ikut menjaga kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan, karena kesuburan tanah dapat dipertahankan dengan memanfaatkan kotoran sapi perah sebagai pupuk kandang,
- g. Pedet jantan bisa dijual dan dijadikan sapi potong, sedangkan pedet betina bisa dipelihara hingga dewasa dan menghasilkan susu.

Kemampuan sapi perah dalam menghasilkan susu ditentukan oleh faktor genetik, lingkungan, dan pemberian pakan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi susu antara lain umur, musim beranak, masa kering, masa kosong, besar sapi, manajemen pemeliharaan dan pakan. Sapi perah umur dua tahun akan menghasilkan susu sekitar 70

sampai 75 persen dari produksi susu tertinggi sapi yang bersangkutan. Pada umur tiga tahun akan menghasilkan susu 80 sampai 85 persen, sedangkan umur empat sampai lima tahun menghasilkan susu 92 sampai 98 persen (Schmidt dan Hutjuers, 1998).

Oleh karena itu faktor yang akan mempengaruhi produksi susu perlu diperhatikan dengan seksama dan ditangani dengan sebaik mungkin dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal.

2. Komoditi Susu dan Perkembangannya

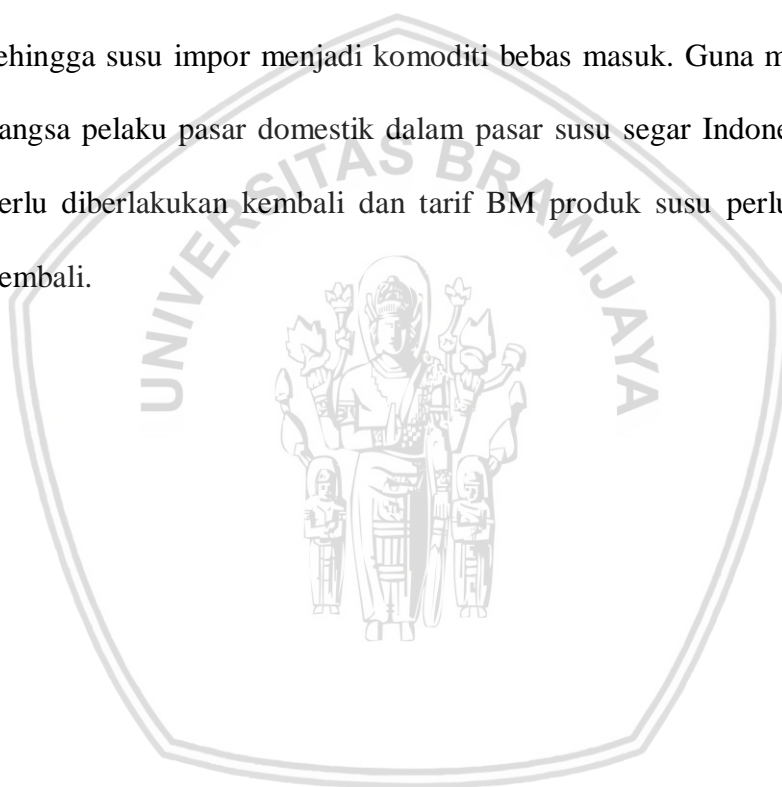
Saat ini konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk susu masih tergolong sangat rendah bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Konsumsi susu masyarakat Indonesia hanya 8 liter/kapita/tahun itu pun sudah termasuk produk - produk olahan yang mengandung susu. Konsumsi susu negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Singapura rata-rata mencapai 30 liter/kapita/tahun, sedangkan negara-negara Eropa sudah mencapai 100 liter/kapita/tahun. Menurut Daryanto (2009), seiring dengan semakin tingginya pendapatan masyarakat dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, dapat dipastikan bahwa konsumsi produk - produk susu penduduk Indonesia akan meningkat. Perkiraan peningkatan konsumsi tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik. Kondisi produksi susu segar Indonesia saat ini, sebagian besar (91 persen) dihasilkan oleh usaha rakyat dengan skala usaha 1-3 ekor sapi perah per peternak. Skala usaha ternak kecil seperti ini jelas kurang ekonomis karena keuntungan yang

didapatkan dari hasil penjualan susu hanya cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup peternaknya saja. Dari sisi produksi kepemilikan sapi perah tiap peternak perlu ditingkatkan. Menurut manajemen modern sapi perah, skala ekonomis bisa dicapai dengan kepemilikan 10-12 ekor sapi per peternak.

Daryanto (2009) kembali menjabarkan bahwa dilihat dari sisi kelembagaan, sebagian besar peternak sapi perah yang ada di Indonesia merupakan anggota koperasi susu. Koperasi tersebut merupakan lembaga yang bertindak sebagai mediator antara peternak dengan industri pengolahan susu. Koperasi susu sangat menentukan posisi tawar peternak dalam menentukan jumlah penjualan susu, waktu penjualan, dan harga yang akan diterima peternak. Peranan koperasi sebagai mediator perlu dipertahankan. Pelayanannya perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas SDM koperasi serta memperkuat networking dengan industri - industri pengolahan. Adaptasi kelembagaan *contract farming* akan sangat membantu terwujudnya upaya ini.

Terkait dengan agribisnis susu, pada tahun 1983 Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi. Dalam SKB tersebut industri pengolah susu diwajibkan menyerap susu segar dalam negeri sebagai pendamping dari susu impor untuk bahan baku industrinya. Proporsi penyerapan susu segar dalam negeri ditetapkan dalam bentuk rasio susu yaitu perbandingan antara

pemakaian susu segar dalam negeri dan susu impor yang harus dibuktikan dalam bentuk "bukti serap" (BUSEP). BUSEP tersebut bertujuan untuk melindungi peternak dalam negeri dari persaingan terhadap susu impor. Namun dengan adanya Inpres No 4 Tahun 1998 yang merupakan bagian dari LoI yang ditetapkan oleh IMF, maka ketentuan pemerintah yang membatasi impor susu melalui BUSEP menjadi tidak berlaku lagi, sehingga susu impor menjadi komoditi bebas masuk. Guna meningkatkan pangsa pelaku pasar domestik dalam pasar susu segar Indonesia, BUSEP perlu diberlakukan kembali dan tarif BM produk susu perlu peninjauan kembali.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah – langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan – peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian adalah pengkajian dalam mempelajari peraturan – peraturan yang terdapat dalam penelitian. Di tinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian (Usman dan Akbar, 2009:4).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Usman dan Akbar (2009:41) adalah bahwa kata deskriptif berasal dari bahasa Inggris, *descriptive*, yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti yang sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambar – gambar atau foto – foto yang di dapat dari data lapangan atau peneliti yang menjelaskan dengan kata – kata. Pelaku atau responden yang menjadi objek dan subjek penelitian kegiatan atau kejadian yang diteliti, dalam konteks (lingkungan) tempat penelitian dilakukan dilaporkan secara deskriptif sehingga pembaca memahami dengan baik laporan hasil penelitian.

Metode kualitatif dalam penelitian di kecamatan Senduro kabupaten Lumajang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi antara peternak sapi perah dan lembaga atau dinas yang terkait dalam pemberdayaan ini. Responden dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Selanjutnya Sugiono dalam Pasolong (2012:161) menyebutkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian – kejadian yang selama penelitian dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung (Sulaismana,2016).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal – hal yang dijadikan sebagai pusat penelitian dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk suatu penelitian. Menurut Moleong (2010:94) fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan yaitu:

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus dapat membatasi bidang

2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi – eksklusif atau kriteria masuk keluar (*inclusion – exclusion*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian merupakan pokok permasalahan awal yang harus ditetapkan sebelum penelitian dilaksanakan. Penentuan fokus penelitian akan memudahkan dalam pengumpulan data dan dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan tempat lokasi penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah, maka fokus penelitiannya adalah:

1. Strategi pemerintah daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, meliputi:
 - a. Pengembangan sumberdaya manusia
 - b. Pengembangan kelembagaan kelompok
 - c. Bantuan modal masyarakat
 - d. Pengembangan usaha produktif
 - e. Penyediaan informasi tepat guna
2. Faktor – faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan peternak sapi perah di Senduro Lumajang.
 - a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya suatu penelitian. Sedangkan situs penelitian adalah letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar

– benar dibutuhkan serta berkaitan dengan tema, masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di kecamatan Senduro Lumajang, dimana kecamatan Senduro merupakan kecamatan terbesar yang memiliki ternak sapi perah di Lumajang. Sehingga, peternak sapi perah di kecamatan Senduro perlu diberdayakan agar dapat menghasilkan susu sapi perah yang lebih produktif dan berkualitas.

Situs penelitian adalah tempat yang lebih spesifik dimana peneliti melakukan penelitian. Situs penelitian dapat berada di kantor, lapangan, tempat kerja narasumber dan tempat peneliti menggali informasi. Adapun yang menjadi situs penelitian dalam pemberdayaan peternak sapi perah di desa Kandangtepus kecamatan Senduro Lumajang adalah:

1. Dinas Pertanian Lumajang
2. Peternak Sapi Perah
3. KUD.Tani Makmur

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif. Dalam proses pengumpulan data di lapangan peneliti berusaha memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat dan dapat menjadi pegangan akan keakuratan dari hasil penelitian nantinya.

Data – data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, sumber data tersebut antara lain:

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari narasumber, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu kejadian atau kegiatan serta hasil pengujian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang
 - b. Ketua KUD.Tani Makmur
 - c. Sekertaris KUD.Tani Makmur
 - d. Peternak Sapi Perah
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen atau arsip laporan yang akan melengkapi serta menjadi data pendukung dalam penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan peternak sapi perah dan pejabat instansi terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi, yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah – masalah yang akan diteliti. Dengan observasi memungkinkan peneliti melakukan pengamatan sendiri kemudian mencatat hal – hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti adalah mengamati proses pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas terkait kepada peternak sapi perah di desa Kandangtepus serta mengamati faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses pemberdayaan peternak sapi perah di kecamatan Senduro Lumajang.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak – pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu peternak sapi perah serta dari dinas terkait.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen – dokumen resmi yang sifatnya internal. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui dokumen – dokumen serta arsip tertulis dari dinas terkait yang relevan beserta foto – foto kegiatan pemberdayaan peternak sapi perah di kecamatan Senduro kabupaten Lumajang.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Usman dan Akbar (2009:78) yang menjadi instrumen penelitian atau alat pengumpul data dalam metode kualitatif adalah peneliti

sendiri. Jadi, peneliti merupakan *key instrument* dalam pengumpulan data. Peneliti harus terjun langsung ke lapangan secara aktif.

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai upaya pemberdayaan peternak sapi perah di desa Kandangtepus kecamatan Senduro Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan mengamati fenomena – fenomena dan wawancara dengan kelompok sasaran yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti sebagai instrumen penelitian itu sendiri dapat mengingat dan menggali informasi lebih dalam terkait data – data yang akan dikumpulkan pada saat di lapangan.
2. Pedoman wawancara, yaitu berupa materi atau poin – poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan benar – benar memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan topik penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti terkadang melakukan wawancara diluar pedoman wawancara. Hal ini dilakukan untuk membuat suasana wawancara menjadi nyaman dan narasumber akan menjelaskan lebih banyak daripada yang diduga peneliti.
3. Catatan lapang, yaitu catatan dilapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian. Peneliti mencatat hal – hal yang dianggap penting dan digunakan sebagai bahan telaah atas apa yang sudah diwawancarakan.

4. Instrumen penelitian lainnya, peneliti menggunakan beberapa peralatan yang membantu penelitian, seperti alat perekam dan kamera melalui ponsel peneliti.

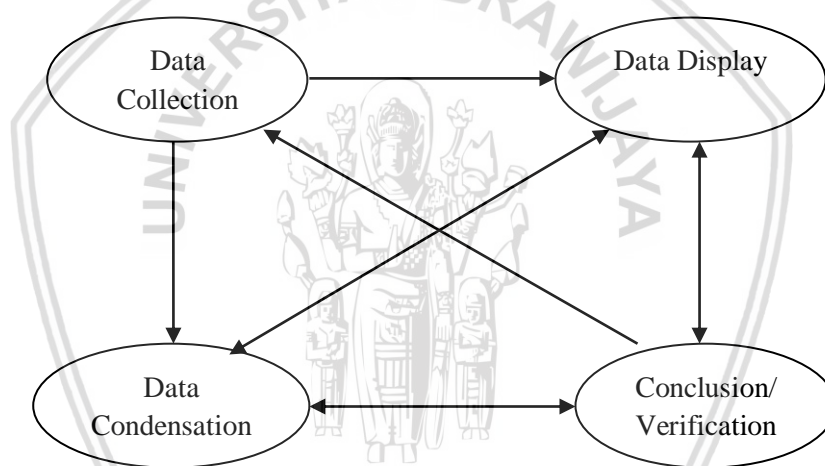
G. Analisa Data

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen 1982 dalam (Moleong,2010:248) “adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Tahap analisa ini, data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang kebenaran – kebenaran yang dapat dipahami untuk menjawab persoalan – persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan dan digunakan untuk memecahkan masalah sekaligus untuk menyarankan kebijakan – kebijakan dalam mencapai tujuan.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Data – data yang telah dikumpulkan baik melalui wawancara maupun dokumentasi dan catatan lapang, sebelum digunakan atau ditampilkan, telah diproses melalui pencatatan, mengelompokkan dan tidak menggunakan tidak perlu serta mengorganisasikan sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan yang memadai.

Adapun metode analisis yang digunakan peneliti yaitu metode analisis data interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33), analisis data kualitatif merupakan suatu proses analisis yang didalamnya terdiri dari 3 aktivitas yang terjadi secara bersamaan yaitu : data kondensasi, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan. Ketiga aktivitas dalam analisis data kualitatif tersebut terjadi secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Adapun penjelasan model interaktif tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

1. Pengumpulan data (*data collection*), yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang *valid*. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti observasi lapangan dan dokumentasi terkait pemberdayaan peternak sapi perah di desa Kandangtepus kecamatan Senduro kabupaten Lumajang.

2. Kondensasi data (*data condensation*), yaitu data yang diperoleh peneliti dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang di reduksi dengan cara merangkum, memilah – milah serta menfokuskan data yang disesuaikan dengan hal – hal yang bersangkutan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Selain itu data tersebut dapat dirubah dengan uraian atau kata – kata sendiri tetapi tidak melenceng atau merubah data yang sebenarnya. Dari data – data yang diperoleh peneliti tersebut dapat dipilah – pilah mana data yang digunakan dan mana data yang tidak digunakan.
3. Penyajian data (*display data*), yaitu aktivitas dimana data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumntasi yang telah dipilah – pilah tersebut dianalisis yang kemudian disajikan dalam bentuk teks atau catatan. Dalam penyajian data sebenarnya pengumpulan dari data – data yang dikerucutkan sehingga peneliti mampu dengan mudah untuk menarik sebuah kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti. Penyajian data sendiri dapat disajikan dalam bentuk bagan, skema, uraian singkat dan lain – lain.
4. Penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing / verification*), yaitu suatu proses menjawab dari rumusan masalah dipaparkan pada tahap awal oleh peneliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang diperoleh dari awal hinggaa akhir disertai dengan penjelasan yang mana penjelasan tersebut harus sesuai dengan bukti yang ada dilapangan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Wilayah Kabupaten Lumajang

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur, dengan memiliki luas 1.790,90 km². Secara geografis Kabupaten Lumajang berada pada posisi 112° -53' - 113° -23' Bujur Timur dan 7° -54' -8° -23' Lintang Selatan. Lumajang beriklim tropis, yang berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, termaksud iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500 - 2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24°C – 23°C. Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), temperature terenda mencapai 5°C. Batas-batas Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| Sebelah Barat | : | Kabupaten Malang |
| Sebelah Utara | : | Kabupaten Probolinggo |
| Sebelah Timur | : | Kabupaten Jember |
| Sebelah Selatan | : | Samudra Indonesia |

Secara administrasi, wilayah pemerintahan Kabupaten Lumajang memiliki 21 kecamatan, 195 desa dan 7 kelurahan.

b. Kependudukan

Berikut ini adalah data berdasarkan jumlah keseluruhan kecamatan di kabupaten Lumajang:

Tabel 4. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Lumajang Tahun 2015

| No | Kecamatan | Luas | Jumlah Penduduk | Jumlah Rumah Tangga | Kepadatan (Kiwa/KM2) | Anggota Rumah Tangga |
|----|--------------|--------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Tempursari | 101,36 | 29.041 | 8.817 | 286 | 3 |
| 2 | Pronojiwo | 38,74 | 32.214 | 9.141 | 832 | 4 |
| 3 | Candipuro | 144,93 | 63.286 | 18.307 | 437 | 3 |
| 4 | Pasirian | 183,91 | 85.277 | 23.475 | 464 | 4 |
| 5 | Tempeh | 88,05 | 80.296 | 22.556 | 912 | 4 |
| 6 | Lumajang | 30,26 | 81.904 | 21.824 | 2707 | 4 |
| 7 | Sumbersuko | 26,54 | 34.484 | 9.774 | 1299 | 4 |
| 8 | Tekung | 30,40 | 33.102 | 9.288 | 1089 | 4 |
| 9 | Kunir | 50,18 | 52.676 | 14.922 | 1050 | 4 |
| 10 | Yosowilangun | 81,30 | 57.765 | 16.348 | 711 | 4 |
| 11 | Rowokangkung | 77,95 | 34.817 | 9.979 | 447 | 4 |
| 12 | Jatiroto | 77,06 | 45.960 | 11.887 | 596 | 4 |
| 13 | Randuagung | 103,41 | 61.889 | 17.626 | 598 | 4 |
| 14 | Sukodono | 30,79 | 50.660 | 13.917 | 1645 | 4 |
| 15 | Padang | 52,79 | 35.269 | 10.175 | 668 | 3 |
| 16 | Pasrujambe | 97,30 | 35.492 | 10.260 | 365 | 3 |
| 17 | Senduro | 228,68 | 43.448 | 12.650 | 190 | 3 |
| 18 | Gucialit | 72,83 | 23.828 | 8.830 | 327 | 3 |
| 19 | Kedungjajang | 92,23 | 44.265 | 12.207 | 479 | 4 |
| 20 | Klakah | 83,67 | 51.951 | 13.887 | 621 | 4 |
| 21 | Ranuyoso | 98,42 | 46.181 | 11.970 | 486 | 4 |

Sumber: Kabupaten Lumajang dalam Angka, 2015

2. Wilayah Kecamatan Senduro

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Senduro merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Lumajang. Luas kecamatan Senduro mencapai 228,68 Km² atau sekitar 12,77% dari luas kabupaten Lumajang.

Secara administratif batas – batas wilayah kecamatan Senduro adalah sebagai berikut:

| | | |
|-----------------|---|-------------------------------|
| Sebelah Utara | : | Kecamatan Gucialit dan Padang |
| Sebelah Timur | : | Kecamatan Sumbersuko |
| Sebelah Selatan | : | Kecamatan Pasrujambe |
| Sebelah Barat | : | Kabupaten Malang |

b. Pemerintahan

Kecamatan Senduro terbagi dalam 12 desa yang keseluruhannya merupakan desa berkategori swasembada. Secara struktur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Ketua Dusun dan Staf Desa. Jumlah rukun tetangga sebanyak 387 dan rukun warga sebanyak 124. Dari total 13.387 kepala keluarga yang ada di kecamatan Senduro terdapat rumah tempat tinggal sebanyak 13.300 unit, yang terdiri dari 5.380 gedung, 3.509 setengah gedung dan 4.411 rumah biasa.

c. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk kecamatan Senduro dari hasil registrasi penduduk tahun 2016 tercatat sebesar 50.142 jiwa, yang terdiri dari 25.179 jiwa (50,19%) penduduk laki – laki san 24.963 jiwa (49,81%) penduduk perempuan. Sedangkan berdasarkan angka rasio jenis kelamin sebesar 101 menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 101 penduduk laki – laki

sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk laki – laki relatif seimbang dengan penduduk perempuan. Rata – rata jumlah anggota rumah tangga di kecamatan Senduro sebesar 4 jiwa.

Selama tahun 2016 terdapat 7028 kelahiran dan 561 kematian sehingga angka kelahiran nettonya sebesar 141. Selain itu pertumbuhan penduduk yang datang dan pergi tercatat masing – masing sebanyak 308 dan 254 jiwa. Pada tahun 2016 penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja sebanyak 24.786 orang dengan didominasi buru tani dan petani yang mencapai 40.11% dari total pekerja yang ada. Untuk jumlah pekerja terbanyak kedua dan ketiga adalah dengan mata pencaharian di bidang perdagangan dan konstruksi, yaitu masing – masing sebanyak 2.955 orang dan 2.627 orang.

B. Hasil Penyajian Data

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah

a. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan unsur yang penting dalam pembangunan karena sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat menentukan bagi keberhasilan suatu pembangunan. Adanya pengembangan sumberdaya manusia pada peternakan sapi perah di kecamatan Senduro setidaknya para peternak sapi perah dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam dan hayati yang ada di

wilayah tersebut, sebab pengelolaan peternakan sapi perah membutuhkan keahlian dan kebiasaan dalam melakukan kegiatan peternakan. Selain itu, para peternak sapi perah masih menggunakan cara pengelolaan yang tradisional, sedangkan permintaan akan susu sapi perah terus meningkat. Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang ini memiliki beberapa kegiatan dimana tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar para peternak sapi perah mengerti dan mampu dalam mengelola peternakan sapi perah yang dimiliki, biasanya kegiatan tersebut berupa penyuluhan dan pembinaan. Hal itu juga di terangkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“jadi sebagian peternak sapi perah menggunakan cara tradisional sebagian sudah mulai modern, yang modern ini biasanya peternak – peternak besar jadi mereka sudah menggunakan teknologi dalam budidaya ternak sapi perahnya. Kita biasanya melakukan penyuluhan dan pembinaan kaitannya dengan pengolahan pakan, karena masalah utama dari budidaya ternak sapi biasanya kan masalah pakan. Jadi dengan adanya pembinaan ini diharapkan para peternak sapi tidak kesulitan dalam mencari pakan ternak”. (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 10.00 WIB di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dengan Bapak Endra Novianto selaku Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa para peternak sapi perah sebagian masih menggunakan cara tradisional dalam budidaya ternak sapi perahnya, oleh sebab itu Dinas Pertanian kabupaten Lumajang memberikan kegiatan – kegiatan yang dapat memberikan kemampuan kepada peternak dalam budidaya ternak sapi perahnya. Adapun beberapa

kegiatan yang diberikan kepada peternak sapi perah diantaranya penyuluhan dan pembinaan, dari kedua kegiatan tersebut diharapkan para peternak sapi perah mendapatkan ilmu maupun pengetahuan yang tujuannya dapat diterapkan dalam kegiatan budidaya ternak sapi perah.

Selain itu dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian kabupaten Lumajang tidak selalu dilakukan dengan mendatangi desa – desa, namun dilakukan dengan cara melalui perwakilan kelompok, dimana nantinya perwakilan kelompok tersebut menyebarkan informasi dari hasil kegiatan yang diikuti kepada rekan – rekan pembudidaya ternak sapi perah lainnya. Hal tersebut dipaparkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“dan setiap lembaga memiliki perwakilan dari setiap perwakilan diharapkan dapat menerima ilmu – ilmu yang telah diberikan dan disampaikan kepada para anggota dan rekan – rekan pembudidaya ternak sapi perah lainnya”. (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 10.00 WIB di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dengan Bapak Endra Novianto selaku Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan seperti penyuluhan dan pembinaan tidak selalu mendatangi setiap desa, akan tetapi melalui perwakilan setiap kelompok yang dimana nantinya perwakilan tersebut dapat menyampaikan hasil – hasil dari kegiatan tersebut kepada para anggotanya. Salah satu kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pertanian kabupaten Lumajang dalam rangka

pengembangan sumber daya manusia adalah penyuluhan teknologi pengolahan pakan ternak. Penyuluhan ini dilakukan karena permasalahan yang sering dihadapi oleh peternakan sapi perah yaitu ketersediaan pakan, khususnya pada musim kemarau. Namun hal tersebut bisa diatasi dengan limbah pertanian dan limbah agroindustri yang dapat dijadikan alternatif sumber pakan yang ekonomis untuk mengatasi kelangkaan ketersediaan pakan ternak, tetapi hal tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan pemanfaatan teknologi pengolahan pakan, limbah pertanian dan limbah agroindustri dapat dioptimalkan kandungan nutrisinya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Selain itu tujuan teknologi pengolahan pakan adalah untuk pengawetan bahan pakan dan untuk meningkatkan nilai gizi bahan pakan. Adapun macam – macam teknologi pengolahan pakan ternak seperti silase, hay, amoniasi, fermentasi dan pakan komplit. Jadi diharapkan dari kegiatan penyuluhan teknologi pengolahan pakan ini adalah agar peternak sapi perah tidak mengalami kesulitan lagi dalam mencari pakan ternak khususnya saat musim kemarau. Berkaitan dengan hal tersebut adapun berikut hasil wawancara:

“Kegiatan penyuluhan teknologi pengolahan pakan adalah salah satu kegiatan Dinas Pertanian kabupaten Lumajang dalam mengembangkan sumber daya manusia dengan cara peternak diberi penyuluhan tentang pengolahan pakan ternak. Jadi peternak tidak mengalami kesulitan lagi dalam mencari pakan ternak terutama saat kemarau dan juga biasanya kan peternak mencari pakan hanya untuk kebutuhan pakan hari itu juga, nah dengan adanya teknologi pengolahan pakan ini peternak bisa

menyimpan pakan ternaknya jadi gak harus setiap hari merumput dan juga dari kegiatan ini peternak bisa memberikan pakan ternak yang bermutu dan memiliki nilai gizi yang baik untuk hewan ternaknya”. (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 10.00 WIB di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dengan Bapak Endra Novianto selaku Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan teknologi pengolahan pakan yang diberikan kepada para peternak sapi perah dilakukan untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan para peternak sapi perah dalam menyiapkan, mengolah dan memproses pakan untuk ternak sapi perahnya. Selain itu, dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan peternak sapi perah dapat membuat pakan ternak yang memiliki mutu dan nilai gizi yang baik sehingga produktivitas susu sapi perah yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan akan meningkatkan pendapatan peternak itu sendiri.



Gambar 4. Peserta Penyuluhan Memperaktekkan Membuat Silase

Sumber: Dokumentasi Dinas Pertanian Kab. Lumajang, 2017



Gambar 5. Hasil dari Teknologi Pengolahan Pakan Ternak

Sumber: Dokumentasi Dinas Pertanian Kab. Lumajang, 2017

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, adapun beberapa manfaat yang dirasakan oleh peternak sapi perah yang telah mengikuti kegiatan tersebut. Hal itu dapat diterangkan melalui wawancara kepada beberapa peternak sapi perah di kecamatan Senduro yang mengikuti penyuluhan tersebut sebagai berikut:

“Kalo dari dinas ada kegiatan penyuluhan cara mengolah pakan ternak sangat bermanfaat itu, ada cara membuat silase itu jadi rumput itu bisa disimpan dan diawetkan. Tapi kan disini sering hujan jadi saya ya tetep cari rumput soalnya rumputnya banyak, hewan ternak saya juga kan gak terlalu banyak”. (Wawancara pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 11.00 WIB, lokasi di rumah yang bersangkutan yaitu bapak Rido'i selaku Ketua Kelompok Telutur desa Kandangan).

“Kegiatan ini sangat bermanfaat, saya diberitahu cara membuat pakan ternak yang baik jadi selain bisa awet lama juga ada gizinya. Susu yang dihasilkan jadi berkualitas” (Wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.00 WIB, lokasi di rumah yang bersangkutan yaitu bapak Jumar selaku Anggota Kelompok Tetelan desa Kandangtepus).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan teknologi pengolahan pakan sangat bermanfaat bagi para peternak sapi. Peternak bisa mengawetkan bahan pakannya dan juga meningkatkan nilai gizi bahan pakan tersebut dari kegiatan penyuluhan ini. Sehingga susu sapi yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan dapat meningkatkan pendapatan peternak. Meskipun di sisi lain masih ada beberapa peternak sapi perah yang masih menggunakan cara tradisional dan kemampuan membuat pakan ternaknya menjadi alternatif lain.

b. Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Keberadaan kelompok memiliki peranan dan fungsi yang penting bagi para anggotanya, terutama sebagai wadah dalam menampung berbagai macam aspirasi anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Peran kelompok usaha ternak sapi perah sangat penting bagi para peternak karena bisa menjadi tempat bermusyawarah bagi para peternak, tempat untuk saling bertukar informasi dan ilmu yang dimiliki para anggotanya. Selain bagi instansi Dinas Pertanian kabupaten Lumajang peran kelompok yaitu sebagai penyalur informasi kepada para anggotanya apabila akan dilaksanakan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan. Adapun berikut hasil wawancara tersebut:

“Kalau kelompok usaha ternak sapi perah di kecamatan Senduro ada beberapa kelompok, biasanya mereka berkumpul untuk diskusi.

Walau gak formal tapi biasanya kalau ada bantuan atau penyuluhan dari dinas biasanya disampaikan ke kelompok kelompok ini sebagai perwakilan peternak sapi perah jadi mereka bisa menyampaikan ke anggota yang lainnya”. (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 10.00 WIB di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dengan Bapak Endra Novianto selaku Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya bagi Dinas Pertanian kabupaten Lumajang keberadaan kelompok usaha ternak sapi perah ini merupakan penyalur informasi bagi para anggota – anggotanya. Sedangkan peternak sapi perah menilai bahwa kelembagaan ini merupakan tempat berkumpul, bermusyawarah dalam melakukan kegiatan – kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama. Adapun berikut data jumlah anggota kelompok peternak sapi perah di kecamatan Senduro:

**Tabel 5. Data Jumlah Anggota Kelompok Usaha Ternak Sapi Perah
Kecamatan Senduro Tahun 2018**

| Kecamatan | Desa | Nama Kelompok | Jumlah Anggota |
|-----------|--------------|-------------------|----------------|
| Senduro | Kandangtepus | Tetelan | 70 |
| | | Mulyorejo | 45 |
| | | Kayu Enak 1 | 30 |
| | | Kayu Enak 2 | 65 |
| | | Gelagaharum 1 | 25 |
| | | Gelagaharum 2 | 25 |
| | | Gelagaharum 3 | 25 |
| | | Wonorejo | 55 |
| | Kandangan | Pacen Kandangan 1 | 30 |
| | | Pacen Kandangan 2 | 25 |
| | | Telutur | 34 |
| | Burno | Karanganyar | 70 |
| | | Bondang | 30 |

Sumber: KUD. Tani Makmur, 2018

Kelompok memiliki dua fungsi, pertama sebagai wadah kerjasama antar anggota dengan pihak lain, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Kelompok merupakan wadah membangun solidaritas sesama anggota. Kedua sebagai unit produksi, dengan berkelompok maka usaha yang dilakukan secara individu dapat mencapai skala ekonomi baik dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya. Adapun hasil wawancara dengan beberapa peternak sapi perah sebagai berikut:

“peran kelompok ya kita bisa tukar menukar informasi jadi berbagi ilmu sesama anggota, kalo ada kegiatan dari dinas atau kud ketua kelompok menyampaikan ke anggotanya”. Jadi kalau menurut saya ada peternak sapi yang gak gabung kelompok ya rugi sendiri gak tau apa – apa. (Wawancara pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 11.00 WIB, lokasi di rumah yang bersangkutan yaitu bapak Rido’i selaku Ketua Kelompok Telutur desa Kandangan)

“kita biasanya ya minimal sebulan sekali mesti kumpul – kumpul membahas tentang ternak sapi perah ini ada kendala atau tidak. Berbagi ilmu dan pengetahuan tentang mengelola hewan ternaknya. Jadi kita kumpulnya bergiliran dari rumah peternak yang satu kerumah peternak yang lain.” (Wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.00 WIB, lokasi di rumah yang bersangkutan yaitu bapak Jumar selaku Anggota Kelompok Tetelan desa Kandangtepus).

Dari hasil wawancara kepada pihak peternak sapi perah dapat disimpulkan bahwa kelompok merupakan tempat untuk berbagi informasi dan ilmu yang dimiliki oleh sesama anggota dan apabila ada informasi kegiatan atau hambatan yang dirasakan anggota maka ketua kelompok akan menyampaikan kepada instansi terkait.

Dalam upaya pengembangan kelembagaan kelompok, Dinas Pertanian kabupaten Lumajang memberikan pelatihan perkoperasian,

pelatihan tersebut dilakukan karena koperasi merupakan mitra bagi para kelompok usaha ternak sapi perah. Pelatihan perkoperasian merupakan kegiatan penularan ilmu atau pengetahuan perkoperasian serta peningkatan keterampilan teknis yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh koperasi dan atau pihak-pihak di luar koperasi yang terarah kepada unsur-unsur gerakan koperasi dan masyarakat dengan tujuan agar anggota koperasi meningkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keperilakuan dan keterampilannya dalam berkoperasi serta masyarakat menjadi tahu, mengerti dan termotivasi menjadi anggota koperasi secara sukarela. Pendidikan dalam hal ini menggambarkan tentang proses, frekuensi, materi, kelompok sasaran, agen-agen pelaksanaan dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari pelatihan perkoperasian tersebut untuk memberikan bekal yang memadai kepada kelompok usaha ternak sapi perah sebagai anggota koperasi sehingga anggota koperasi dapat berperan secara aktif dan dinamis.

Pelatihan perkoperasian dilakukan setiap tahun yang berlokasi di Dinas Pertanian atau di tempat pertemuan yang telah disediakan oleh Dinas Pertanian dengan mengundang perwakilan kelompok usaha ternak sapi perah.

c. Bantuan Modal Masyarakat

Pemupukan modal masyarakat merupakan pemberian bantuan yang dimana bantuan tersebut tujuannya mendorong masyarakat

untuk melakukan kegiatan dengan pemberian modal. Pemberian bantuan modal yang dilakukan yaitu melalui program kredit usaha rakyat (KUR). KUR adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM dan koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, yaitu UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, yaitu usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga keuangan mikro dan KSP/USP koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan bank pelaksana.

Tujuan program KUR adalah untuk meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKM. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM mencakupi:

- 1) Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
- 2) Pengembangan kewirausahaan
- 3) Peningkatan pasar produk UMKMK

4) Reformasi regulasi UMKMK

Melalui program KUR diharapkan peternak sapi perah dapat mengembangkan usaha ternak sapi perahnya sehingga program KUR diharapkan akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas sapi perah serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para peternak sapi perah. Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu narasumber sebagai berikut:

“program KUR ini tujuannya untuk mengembangkan usaha ternak sapi perah agar peternak lebih giat melakukan produktivitas melalui suntikan dana yang diperolehnya, dana yang diperoleh sekitar 25 juta perorang yang disalurkan melalui bank BNI”. (Wawancara pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 10.00 WIB, lokasi di KUD.Tani Makmur Senduro dengan bapak Bari selaku Sekertaris KUD.Tani Makmur)

Selain itu salah satu peternak sapi perah yang menerima modal dari program KUR mengatakan bahwa:

“kalau modal dari KUR saya pakek buat usaha ternak sapi saya, nambah sapi, beli alat – alat. Jadi usaha ternak sapi saya jadi tambah baik. Awalnya saya Cuma punya sapi 2 terus saya pakek uang nya buat beli sapi meskipun sapi pedet tapi nanti setelah bisa menghasilkan susu bisa meningkatkan pendapatan saya”. (Wawancara pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.00 WIB, lokasi dirumah yang bersangkutan yaitu bapak Firman selaku penerima modal KUR dari desa Kandangtepus).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa melalui program KUR kepada peternak sapi perah di kecamatan Senduro digunakan untuk memberikan dorongan kepada peternak sapi perah untuk mengembangkan usaha ternak sapinya sehingga dapat meningkatkan produktivitas sapi perah. Melalui program KUR terdapat tiga desa yang menerima KUR di kecamatan Senduro yang

manjadi sentral peternakan sapi perah yaitu desa Kandangtepus, desa Kandangan dan desa Burno dengan bank pelaksana yaitu BNI dengan rata – rata jumlah pinjaman sekitar 25 juta perorang. Berikut jumlah penerima KUR di tiga desa tersebut:

Tabel 6. Tabel Penerima KUR Tahun 2017

| No | Desa | Jumlah Penerima |
|----|--------------|-----------------|
| 1 | Kandangtepus | 17 Orang |
| 2 | Kandangan | 80 Orang |
| 3 | Burno | 65 Orang |

Sumber: KUD. Tani Makmur, 2018

d. Pengembangan Usaha Produktif

Pengembangan usaha produktif merupakan salah satu strategi dalam pemberdayaan yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan pendapatan peternak sapi perah.



Gambar 6. Penyuluhan Teknologi Pasca Panen

Sumber: Dokumentasi Dinas Pertanian Kab. Lumajang, 2013

Dalam upaya pengembangan usaha produktif maka yang dilakukan pemerintah adalah memberikan penyuluhan mengenai

prroduk – produk yang dapat dibuat dari susu sapi. Salah satu penyuluhan yang diberikan pemerintah Dinas Pertanian kabupaten Lumajang adalah penyuluhan teknologi pasca panen yaitu merupakan suatu kegiatan yang bertujuan agar kualitas susu yang dihasilkan sesuai dengan standar sehingga harga susu yang dijual kepada industri pengolahan susu tinggi. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Rendahnya kualitas susu yang dihasilkan oleh peternak sapi perah biasanya karena sistem manajemen pemerahan dan penanganan susu yang belum sesuai dengan standar jadi berdampak pada susu sapi perah yang dihargai relatif murah oleh industri pengolahan susu dengan penetapan standar mutu susu yang semakin ketat dan juga produk susu itu kan produk yang gampang rusak jadi harus di dukung dengan sarana dan prasarana yang standar dan kebanyakan peternak hanya setor susu saja tapi ada sebagian kecil peternak membuat produk sendiri”. (Wawancara pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 10.00 WIB di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dengan Bapak Endra Novianto selaku Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang).

Dari penjelasan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyuluhan teknologi pasca panen merupakan penyuluhan kepada peternak sapi perah dengan aspek penanganan yang sesuai dengan *standart operational procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Berikut hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ternak sapi perah pasca panen:

- a) Sanitasi dan hygiene pemerahan
- b) Kebersihan kandang
- c) Persiapan alat dan pemerah
- d) Proses pemerahan susu

Selain itu dalam penyuluhan pasca panen ini Dinas Pertanian kabupaten Lumajang juga memberikan penyuluhan tentang produk olahan susu karena pengolahan susu oleh industri rumah tangga dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi usaha sapi perah. Berikut beberapa bentuk olahan susu yang telah disampaikan dalam penyuluhan pasca panen:

- a) Susu fermentasi
- b) Susu pasteurisasi
- c) Kefir

Penyuluhan tentang produk olahan susu adalah salah satu cara Dinas Pertanian untuk mengembangkan usaha susu sapi. Sehingga peternak sapi perah tidak hanya menjual susu sapi kepada KUD.Tani Makmur melainkan dapat memproduksi sendiri produk olahan susu sapi yang memiliki nilai jual lebih tinggi yang dapat meningkatkan pendapatan peternak sapi perah.

Namun pengembangan usaha produktif yang dilakukan Dinas Pertanian kurang berhasil karena peternak sapi perah tidak dapat membuat produk – produk dari olahan susu sapi perah yang terkendala dari segi alat, pemasaran dan pengetahuan peternak sapi perah itu sendiri untuk mengelola produk dari susu sapi. Hal tersebut disampaikan melalui wawancara dengan salah satu peternak sapi perah:

“Kita pernah diberikan penyuluhan membuat susu rasa – rasa kefir dan lain – lain tapi itu sudah lama sekali. Dan kendalanya itu di alat

sama pemasarannya. Alatnya kan mahal terus kita juga masih perlu di berikan penyuluhan lagi tentang membuat produk dari olahan susu”. (Wawancara pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 11.00 WIB, lokasi di rumah yang bersangkutan yaitu bapak Rido’i selaku Ketua Kelompok Telutur desa Kandangan)

Dari Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk mengembangkan usaha produktif kurang efektif karena penyuluhan yang diberikan kurang intensif dan juga perlu adanya bantuan terkait alat dan pemasaran untuk menunjang pengembangan usaha susu sapi tersebut.

e. Penyediaan Informasi Tepat Guna

Informasi merupakan suatu pengetahuan yang didapat melalui penyampaian, penyediaan informasi tepat guna dalam melakukan kegiatan pemberdayaan bagi peternak sapi perah khususnya di kecamatan Senduro dirasa sangat perlu karena kegunaan informasi sangat penting dalam mendukung hal – hal yang berkaitan dengan pengetahuan yang belum didapat oleh para peternak sapi perah itu sendiri.

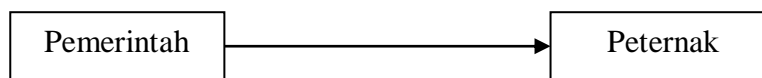
Peran pemerintah Dinas Pertanian kabupaten Lumajang sebagai penyedia informasi telah memberikan layanan kepada peternak sapi perah yang berbentuk konsultasi. Layanan konsultasi ini merupakan komunikasi dua arah yaitu dari dinas ke peternak dan peternak ke dinas. Adapun berikut pengertian terkait keduanya pertama dinas ke peternak sapi perah yaitu segala sumber informasi yang bersumber dari dinas dan diberikan kepada para peternak sapi

perah biasanya informasi – informasi apabila ada kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan di lokasi peternak sapi perah tersebut, yang kedua pembudidaya ke dinas apabila ada informasi yang bersumber dari peternak sapi perah seperti berupa konsultasi, keluhan – keluhan dan lain sebagainya. Selain itu adapun berikut hasil wawancara dengan Dinas terkait:

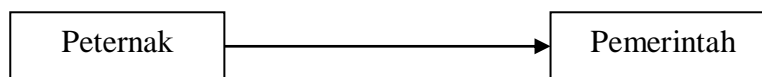
“Jadi kita sebagai instansi teknis pelayanan publik pasti memberikan informasi – informasi kepada masyarakat, kalau mau mengadakan penyuluhan kita pasti memberi tahu terlebih dahulu kepada kelompok – kelompok untuk mengadakan pertemuan terkait penyuluhan dan sebaliknya kalau peternak ada keluhan – keluhan juga kita terima”. (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dengan Bapak Endra Novianto selaku Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan wawancara diatas maka kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian akan diinformasikan terlebih dahulu. Lebih lanjut diterangkan bahwasanya dari pihak peternak sapi perah juga menyampaikan keluhan – keluhan atau kendala yang dihadapi terkait dengan aktivitas kegiatan peternakan sapi perah yang dilakukannya. Selain itu adapun berikut bagan yang menunjukan komunikasi pemerintah dan pembudidaya dalam hal pemberian informasi:

1) Tipe 1



2) Tipe 2

**Gambar 7. Tipe Komunikasi Dua Arah**

Sumber: Hasil Observasi

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan melalui dua arah yaitu dapat bersumber dari pemerintah maupun dari peternak itu sendiri. Untuk itu adapun berikut hasil wawancara dengan peternak sapi perah:

“Kalau informasi ada biasanya kalau mau ada kegiatan – kegiatan biasanya kabar – kabar ke saya nanti saya yang menyampaikan kepada anggota”. (Wawancara pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 11.00 WIB, lokasi di rumah yang bersangkutan yaitu bapak Rido’i selaku Ketua Kelompok Telutur desa Kandangan)

Berdasarkan hasil wawancara penyediaan informasi yang tepat guna khususnya bagi para peternak sapi perah di kecamatan Senduro telah dilakukan dinas terkait seperti layanan konsultasi, pemberian informasi dan penyuluhan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

1) Tersedianya Sarana dan Prasaran Pendukung

Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan primer dalam aktivitas peternakan karena sarana dan prasarana dapat

mendukung kegiatan yang dilakukan. Sarana dan prasarana dalam kegiatan peternakan sapi perah ini mencakup jalan raya sebagai jalan produksi, ketersediaan pakan dan akses pendistribusian. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana di kecamatan Senduro dalam kegiatan peternakan sapi perah tersebut. Berikut penjelasan terkait pembangunan tersebut:

a) Tersedianya Infrastruktur Jalan Raya dan Jalan Produksi

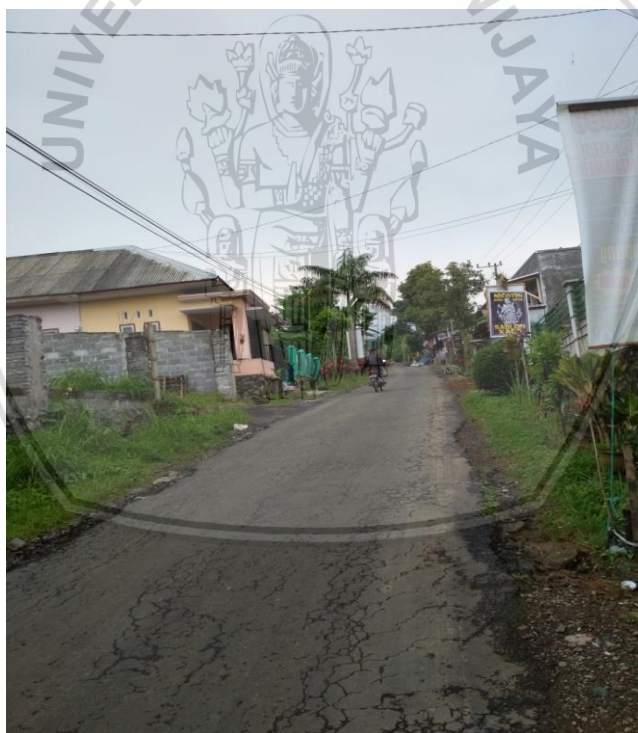
Ketersediaan infrastruktur seperti jalan raya, jalan produksi dan lain sebagainya sangat memudahkan para peternak sapi perah dalam melakukan aktivitasnya. Kecamatan Senduro terletak kurang lebih 18 km dari pusat kota Lumajang, yang terdiri dari 12 desa dimana setiap desa memiliki jarak yang berbeda beda dari Kecamatan. Berikut adalah data yang menunjukkan jarak jalan di Kecamatan Senduro:

Tabel 7. Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan Tahun 2016

| No | Desa | Jarak ke (Km) Kecamatan |
|----|------------------|-------------------------|
| 1 | Purworejo | 9 |
| 2 | Sarikemuning | 3 |
| 3 | Pandansari | 3 |
| 4 | Senduro | 0 |
| 5 | Burno | 3 |
| 6 | Kandang Tepus | 3 |
| 7 | Kandangan | 3 |
| 8 | Bedayu | 6 |
| 9 | Bedayu Talang | 8 |
| 10 | Wono Cempoko Ayu | 6 |
| 11 | Argosari | 17 |
| 12 | Ranupani | 28 |

Sumber : Kecamatan Senduro dalam Angka, 2016

Selain itu jalan produksi merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian dan perkebunan untuk memperlancar pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan juga mengangkut hasil produksi susu sapi perah. Ada tiga desa di kecamatan Senduro yang menjadi sentra produksi susu sapi perah yaitu desa Kandangtepus, desa Kandangan dan desa Burno. Pada desa – desa tersebut kondisi infrastruktu jalannya sudah sangat baik. Berikut adalah infrastruktur jalan produksi tersebut:



Gambar 8. Jalan Produksi Desa Kandangtepus

Sumber: Dokumentasi lapangan



Gambar 9. Jalan Produksi Desa Kandangan

Sumber: Dokumentasi dilapangan



Gambar 10. Jalan Produksi Desa Burno

Sumber: Dokumentasi dilapangan

b) Tersedianya Pakan Ternak

Secara geografis kecamatan Senduro terletak di barat kabupaten Lumajang memiliki ketinggian 500 – 700 Mdpl sehingga tergolong berada pada wilayah dataran tinggi yang sangat mendukung usaha ternak sapi perah. Dalam usaha ternak sapi perah, ketersediaan pakan ternak sangat penting, oleh karena itu pada wilayah kecamatan Senduro ketersediaan pakan ternak sangat melimpah karena kondisi geografis yang mendukung. Pada wilayah kecamatan Senduro tahun 2017 ketersediaan pakan sebesar 3.595.229 kilogram per tahun (Sekertaris KUD.Tani Makmur,2018). Peternak memperoleh rumput atau hijauan dari lahan yang dimiliki sendiri, namun apabila rumput atau hijauan tidak mencukupi peternak menyewa lahan perhutani untuk ditanami rumput. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh peternak dengan pihak perhutani maka akan semakin memudahkan peternak sapi perah dalam memperoleh pakan untuk hewan ternaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan pakan di kecamatan Senduro sudah mencukupi.



Gambar 11. Lahan Pakan Ternak Sapi Perah

Sumber: Dokumentasi dilapangan

c) Ketersediaan Bibit Sapi Perah

Ketersediaan bibit sapi perah di kabupaten Lumajang khususnya kecamatan Senduro telah tersedia dengan baik. Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang telah menyarankan kepada peternak sapi perah melalui KUD.Tani Makmur di Senduro untuk memperoleh bibit sapi perah yang berasal dari Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Balai tersebut telah ditunjuk Kementerian Pertanian untuk mendistribusikan bibit kepada para peternak sapi perah. Selain itu melalui program UPSUS SISWAB (Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting) pemerintah Dinas Pertanian telah melakukan program inseminasi buatan kepada 81.000 ekor sapi di kabupaten Lumajang pada tahun 2017 dimana capaian tersebut

dikatakan melebihi target yang ditetapkan oleh Provinsi yaitu 61.000 ekor sapi. Sehingga kemudahan dalam memperoleh bibit tersebut menjadikan peternak sapi perah semakin mudah untuk mengembangkan peternakan sapi perahnya.

d) Mudahnya Distribusi Produk Susu Sapi Perah

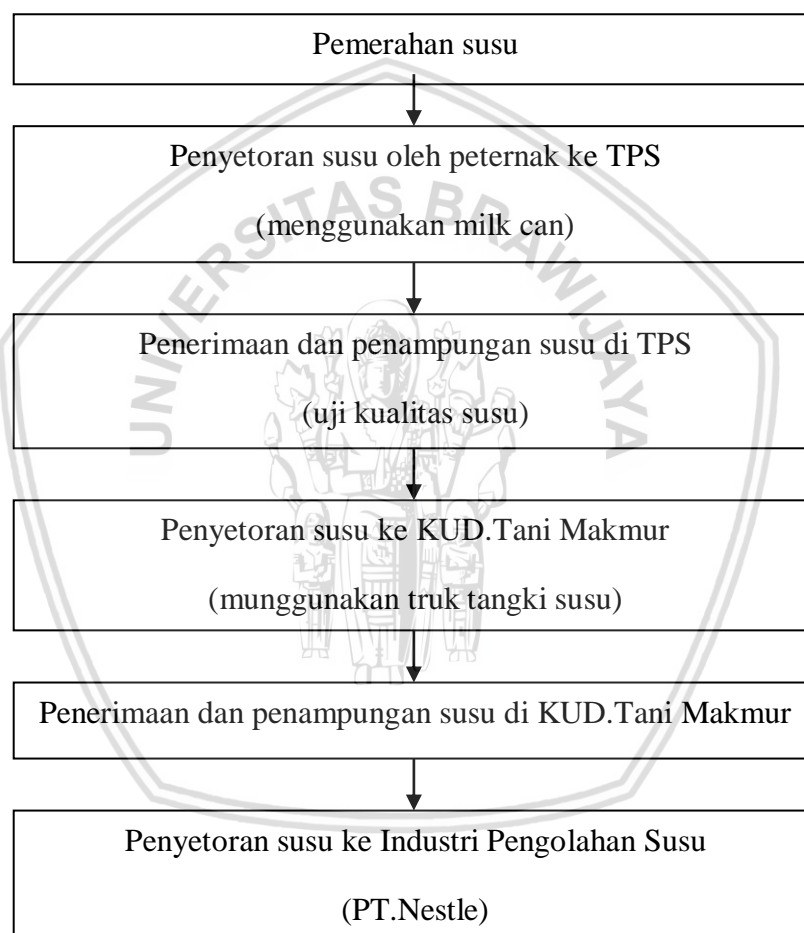
Produk sapi perah merupakan produk yang mudah sekali rusak apabila tidak ditangani dengan aman, baik dan cepat. Tetapi melalui KUD.Tani Makmur di Senduro, para peternak sapi perah hanya mengantarkan produk susu sapi perahnya ke pos penampungan yang berada pada wilayah kelompok masing – masing.



Gambar 12. Pos Penampungan Susu Sapi Perah Desa Kandangan

Sumber: Dokumentasi dilapangan

Proses distribusi selanjutnya dilakukan oleh KUD.Tani Makmur dengan mengirim produk susu sapi perah ke KUD.Tani Makmur. Berikut tahapan – tahapan proses distribusi berdasarkan penejelasan Sekertaris KUD. Tani Makmur di Senduro:



Gambar 13. Proses Distribusi Susu Sapi Perah

Sumber: KUD. Tani Makmur kecamatan Senduro, 2018

Dalam proses distribusi terdapat sarana dan prasarana seperti tempat penampungan susu (TPS) yang terdapat di masing – masing desa yang termasuk dalam kelompok

usaha ternak sapi perah. Pembangunan TPS merupakan salah satu cara agar kualitas susu sapi perah tetap baik serta memudahkan anggota kelompok peternak sapi perah untuk menyetorkan susu. Peternak menyetorkan susu sapi perahnya sehari dua kali yaitu pagi dan sore hari ke TPS yang tersedia di desanya. Masing – masing TPS terdapat cooling unit yang berfungsi menampung susu yang disetorkan oleh peternak, dimana cooling unit tersebut mampu menampung 2000 – 6000 liter susu setiap harinya. Susu yang sudah di perah harus segera disetorkan ke TPS dan disimpan dalam cooling unit untuk mencegah kerusakan susu.

Dalam akses distribusi pemerintah juga telah memberikan bantuan berupa *milk can* kepada peternak sapi perah. *Milk can* merupakan alat untuk menampung dan menyimpan sementara susu hasil pemerahan untuk segera di kirim ke tempat penampungan susu.

2) Peran Kelembagaan Kelompok Terhadap Para Peternak Sapi Perah

Peran kelompok dalam peternakan sapi perah memiliki dua fungsi, pertama sebagai wadah kerjasama antar anggota dan dengan pihak lain sehingga mampu menghadapi berbagai masalah dan tantangan serta membangun solidaritas sesama

anggota. Kedua sebagai unit produksi, peran kelompok juga sangat bermanfaat bagi para peternak sapi perah yang dimana secara langsung dan tidak langsung mendorong para peternak untuk melakukan kegiatan – kegiatan dalam produktivitas peternakan sapi perah. Sebagai contoh kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam kelompok yaitu kegiatan musyawarah kelompok, apabila ada permasalahan – permasalahan yang sedang terjadi maka para peternak sapi perah melakukan perkumpulan dan membahas terkait permasalahan tersebut untuk dicarikan solusinya. Selain itu secara tidak langsung kelompok membentuk *forum group discussion* (fgd) yang didalamnya terdapat diskusi pada kelompok – kelompok yang sedang melaksanakan.

Peternak sapi perah telah merasakan beberapa manfaat yang dirasakan dalam mengikuti dan bergabung dengan kelompok, sebab kunci pintu masuknya informasi dari peran pemerintah melalui kelompok ini. Jikalau ada peternak sapi perah yang tidak mengikuti dan bergabung dengan kelompok maka dirasa sangatlah rugi terutama pada keterbatasan memperoleh informasi – informasi. Hal inilah yang menjadikan peran kelembagaan kelompok semakin kuat dan dirasa sangat berkontribusi bagi para peternak sapi perah.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya Kesadaran Peternak Sapi Perah

Sapi perah merupakan salah satu ternak penghasil susu yang cukup tinggi, untuk mendapatkan produk susu berkualitas tinggi perlu diperhatikan manajemen pemeliharaan dari sapi perah. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan usaha beternak sapi perah yaitu faktor kebersihan, terutama kebersihan lingkungan baik itu kebersihan kandang maupun kebersihan ternak itu sendiri. Sayangnya tingkat kesadaran peternak sapi perah dalam menjaga kebersihan kandang dan hewan ternak masih rendah, hal ini terbukti dengan masih banyak ditemukan hewan ternak yang terkena penyakit seperti *Mastitis* dan *Brucella*.

Mastitis merupakan penyakit hewan menular yang menyerang puting susu sapi. Proses penularan agen penyebab *mastitis* ini dapat terjadi pada waktu pemerahan yang dilakukan secara manual melalui tangan pemerah, air untuk mencuci ambing susu, kain lap atau peralatan yang lain yang dipakai untuk mengeringkan ambing sebelum dan sesudah proses pemerahan. Sedangkan *Brucella* merupakan penyakit ternak menular yang menjadi persoalan sebagian besar peternak sapi perah. Kerugian yang diakibatkan oleh *Brucella* dapat berupa keguguran (kluron), anak ternak yang dilahirkan lemah

kemudian mati, terjadi gangguan alat – alat reproduksi yang mengakibatkan kemajiran temporer atau permanen dan turunnya produksi air susu. Permasalahan yang diakibatkan oleh penyakit *Brucella* dan mastitis pada ternak dapat merugikan peternak. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang peternak sapi perah sebagai berikut:

“kalau *mastitis* dan *brucella* memang sering dialami. Apalagi mastitis, kalo tidak segera ditangani meskipun masih mastitis awal itu produksi susunya sudah tidak baik, bisa macet produksi susunya, bahkan bisa mati juga sapinya dan membuat peternak jadi rugi.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh peternak adalah terkait penyakit *mastitis* dan *brucella*. Pemerintah telah melakukan bimbingan teknis pencegahan penyakit hewan menular kepada para peternak sapi perah. Upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi kerugian peternak sapi perah yang disebabkan oleh penyakit *mastitis* dan *brucella* yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan produksi susu serta bahkan dapat menyebabkan kematian ternak terutama pada sapi yang masih muda (pedet). Program yang dilakukan berupa bimbingan teknis kepada peternak sapi perah dengan topik pencegahan penyakit hewan menular mastitis dan *brucella*, sekaligus pemberian obat. Namun meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah ini tetap saja yang harus di perhatikan dari permasalahan ini

adalah tentang kesadaran peternak sapi perah itu sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti kandang dan hewan ternak itu sendiri.

2) Kurangnya Penyuluhan Pemerintah Kepada Peternak Sapi Perah

Peran pemerintah terhadap masyarakat dirasa sangat dibutuhkan oleh peternak sapi perah. Sebab peran pemerintah merupakan dorongan tersendiri bagi peternak sapi perah. Namun kegiatan kunjungan dirasa kurang. Hal ini dapat menyebabkan sosialisasi yang dirasa kurang menyeluruh kelapisan masyarakat peternak sapi perah. Terkait dengan hal ini adapun berikut wawancara dengan salah satu peternak sapi perah:

“Dulu pernah ada kegiatan – kegiatan dari dinas, ya kayak penyuluhan gitu. Cuma biasanya setahun sekali”. (Wawancara pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 11.00 WIB, lokasi di rumah yang bersangkutan yaitu bapak Rido'i selaku Ketua Kelompok Telutur desa Kandangan)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kunjungan Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dirasa kurang dan juga jarang memberikan informasi. Namun penyebab kurangnya kunjungan pihak terkait disebabkan jumlah sumber daya aparatur yang dirasa kurang dalam menangani banyaknya peternak sapi perah di Kabupaten Lumajang. Terkait dengan hal itu adapun berikut hasil wawancara tersebut:

“Kan staffnya terbatas, gantian setiap tahunnya, sekarang kelompok ini wilayah ini. Tahun berikutnya bisa saja kecamatan dan kelompok lain”. (Wawancara pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di kantor Dinas Pertanian Kabupaten

Lumajang dengan Bapak Endra Novianto selaku Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa permasalahan kurangnya kunjungan pemerintah kepada beberapa peternak sapi perah disebabkan keterbatasan jumlah aparatur dalam menangani peternakan sapi perah yang banyak di kabupaten Lumajang. Untuk itu agar lebih efisien maka biasanya dinas jika ada kegiatan – kegiatan hanya memanggil perwakilan kelompok saja.

C. Hasil Analisis Data

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah

a. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pembangunan merupakan kegiatan untuk melakukan perubahan secara sadar dan terencana. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:18) dasar pada interpretasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber yang paling strategis. Karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabdikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antar birokrasi negara dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu Parsons et al., (1994) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:29) menjelaskan bahwasannya pemberdayaan menekankan pada objek manusia agar memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian. Sehingga pemberdayaa yang dimaksud dengan hal itu adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi kejadian – kejadian serta lembaga – lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Lebih lanjut, Mardikanto dan Soebiato (2013:70) menjelaskan upaya dalam memberdayakan masyarakat perlu mengikutsertakan semua potensi yang ada pada masyarakat. Dalam hubungan ini pemerintah daerah harus mengambil peranan lebih besar karena mereka yang paling mengetahui mengenai kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Pendapat lain dalam konsep pemberdayaan Prijono dan Pranarka (2013:51) menjelaskan manusia adalah subjek dirinya sendiri, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses yang memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat tertinggal.

Kecamatan Senduro yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dibidang peternakan serta kondisi geografis yang mendukung menjadi objek pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Sebab peternak sapi perah perlu mendapatkan pengembangan kualitas SDM dalam mengelola peternakan sapi perahnya. Adapun kegiatan yang dilakukan, yaitu penyuluhan teknologi pengolahan pakan ternak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kemampuan kepada peternak, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan skill dalam pengawetan bahan pakan dan meningkatkan nilai gizi bahan pakan.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia bagi para peternak sapi perah dengan melakukan penyuluhan penyuluhan teknologi pengolahan pakan ternak. Dari kegiatan tersebut maka dalam pengembangan sumber daya manusia pada peternak sapi perah di kecamatan Senduro merupakan bentuk dari kegiatan pemberdayaan yang memberikan kemampuan dan keterampilan kepada peternak sapi perah itu sendiri. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembangunan sumber daya manusia telah sesuai dengan konsep pemberdayaan yang menekankan pada pembangunan sumber daya manusia agar memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan dalam menjalani kehidupannya.

b. Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Hayami dan Kikuchi (1981) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:116) menjelaskan bahwa kelembagaan sebagai perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas masyarakat. Lebih lanjut Mardikanto dan Soebiato (2013:117) menjelaskan kelembagaan memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- 1) Kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen, ia menjadi permanen karena dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan
- 2) Kelembagaan berkaitan dengan hal – hal yang abstrak yang menentukan perilaku. Sesuatu yang abstrak tersebut merupakan suatu kompleks dari beberapa hal yang sesungguhnya terdiri dari beberapa bentuk yang tidak sepadan (*selevel*). Hal yang abstrak ini kira – kira sama dengan *public mind* atau “wujud ideal kebudayaan”
- 3) Berkaitan dengan perilaku, atau seperangkat *mores* (tata kelakuan) atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat (*establish way of behaving*). Perilaku yang terpola merupakan kunci keteraturan hidup.
- 4) Kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi
- 5) Kelembagaan merupakan cara – cara yang standar untuk memecahkan masalah. Tekanannya adalah pada kemampuannya untuk memecahkan masalah.

Lebih lanjut, kelompok usaha ternak sapi perah di kecamatan Senduro terbagi menjadi 3 desa yaitu desa Kandangtepus, desa Kandangan dan desa Burno. Desa Kandangtepus memiliki 8 kelompok usaha, desa Kandangan memiliki 3 kelompok usaha dan desa Burno memiliki 2 kelompok usaha. Kegiatan – kegiatan yang dijalankan dalam kelompok peternak sapi perah itu sendiri sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, serta keberadaan kelompok – kelompok tersebut masih berjalan dan aktif bagi para peternak sapi

perah. Lebih lanjut salah satu ketua kelompok menjelaskan bahwa kelompok usaha tersebut merupakan wadah kerjasama antar anggota dan dengan pihak lain. Selain itu, peran anggota bagi kelompok sangat berpengaruh terutama dalam hal komunikasi dan bahu membahu untuk melakukan kegiatan peternakan sapi perah.

Di sisi lain adapun peran dinas terkait kelompok tersebut yaitu sebagai penyalur informasi bantuan dari pemerintah contohnya dengan adanya kegiatan dari pemerintah, maka kelompok mengkoordinir para anggotanya untuk melakukan persiapan – persiapan yang diperlukan demi menunjang kegiatan tersebut. Peran kelembagaan kelompok bisa menjadi kelompok usaha peternak sapi perah yang dinamis. Didalamnya terdapat aktivitas para peternak sapi perah yang bisa melayani anggotanya dengan berbagai bentuk kegiatan seperti fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok usaha merupakan kelompok yang ideal bagi peternak sapi perah karena fungsi dan peran kelompok tersebut menjadi pendorong bagi peternak sapi perah dalam melakukan kegiatan – kegiatan peternakan sapi perah. Selain itu pada dasarnya lembaga ataupun kelompok yang dinamis ialah kelompok yang mampu mandiri dan selalu berupaya menjaga keutuhan lembaga atau kelompok tersebut. Sehingga dengan fungsi kelompok usaha tersebut maka para peternak sapi perah diharapkan mampu menghadapi berbagai

tantangan dan masalah serta memiliki posisi tawar yang baik dan juga dengan berkelompok maka usaha yang dilakukan secara individu dapat mencapai skala ekonomi yang baik dari segi kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya.

Kelompok usaha ternak sapi perah di kecamatan Senduro kabupaten Lumajang bermitra dengan KUD.Tani makmur sebagai penyalur dan penampung hasil susu peternak sapi sehingga Dinas Pertanian memberikan pelatihan yang berguna untuk mengembangkan kelembagaan kelompok usaha ternak sapi perah. Pelatihan perkoperasian tersebut dapat memberikan bekal yang memadai agar kelompok usaha ternak sapi perah sebagai anggota kelompok KUD. Tani Makmur dapat berperan aktif dan dinamis dalam koperasi tersebut. Sehingga dengan memberikan pelatihan perkoperasian maka Dinas Pertanian kabupaten Lumajang telah memberikan pengembangan kelembagaan kelompok pada kelompok usaha ternak sapi perah di kecamatan Senduro kabupaten Lumajang.

c. Bantuan Modal Masyarakat

Subejo dan Supriyatno (2004) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:45) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial, dan
- 2) Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong

masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Dalam kegiatan pemberdayaan peternak sapi perah di kecamatan Senduro, pemerintah telah memberikan program KUR melalui bank pelaksana yaitu BNI dengan pemberian bantuan modal, adapun berikut tujuan program KUR adalah untuk meningkatkan sektor rill dan memberdayakan UMKM. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM mencakupi:

- 1) Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
- 2) Pengembangan kewirausahaan
- 3) Peningkatan pasar produk UMKMK
- 4) Reformasi regulasi UMKMK

Melalui bantuan tersebut, terdapat sekitar 162 orang peternak sapi perah dengan jumlah dana sekitar 25 juta perorang yang berada pada desa Kandangtepus, Kandangan dan Burno. Dana KUR digunakan untuk mengembangkan usaha ternak sapi perah peternak tersebut sehingga usaha ternak sapi perahnya akan lebih produktif. Maka dari itu, bantuan modal KUR kepada peternak sapi perah telah sesuai dengan konsep pemberdayaan dimana menekankan pada proses memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian ekonomi, ekologi dan sosial.

d. Pengembangan Usaha Produktif

Dalam upaya melakukan pengembangan usaha produktif maka peran pemerintah dalam hal ini adalah memberikan pemberdayaan kepada peternak sapi perah agar peternak sapi perah mampu mengembangkan usaha ternaknya menjadi lebih produktif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan peternak sapi perah itu sendiri. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:225) pemerintah perlu melakukan bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat yang menyangkut banyak hal, seperti:

- 1) Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai – nilai produk
- 2) Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha dan pengembangan jejaring kemitraan
- 3) Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan di dukung oleh keunggulan lokal
- 4) Peningkatan aksesibilitas terhadap: modal, pasar dan informasi
- 5) Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat

Pemerintah Dinas Pertanian dalam usaha melakukan pengembangan usaha produktif telah memberikan penyuluhan tentang teknologi pasca panen dimana penyuluhan tersebut berisi tentang penyuluhan pasca panen yang bertujuan agar kualitas susu

yang dihasilkan sesuai dengan standar sehingga harga susu yang dijual kepada industri pengolahan susu tinggi. Selain itu dalam penyuluhan pasca panen tersebut juga memberikan penyuluhan tentang produk olahan susu karena pengolahan susu oleh industri rumah tangga dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi usaha sapi perah. Terkait dengan penyuluhan pasca panen, dinas Pertanian kabupaten Lumajang mengundang 50 orang perwakilan kelompok dari seluruh kelompok ternak yang ada di kabupaten Lumajang. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengefisienkan waktu penyuluhan dan para perwakilan peternak tersebut menularkan ilmu yang diperoleh kepada para anggota kelompok masing – masing.

Maka berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas terkait telah melakukan peningkatan pengetahuan teknis dan pengembangan jiwa kewirausahaan. Namun beberapa peternak sapi perah masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha produktifnya karena msih kurangnya penyuluhan yang diberikan dinas terkait dalam pengembangan usaha produktif serta kurangnya peningkatan aksesibilitas seperti bantuan peralatan dan pemasaran produk.

e. Penyediaan Informasi Tepat Guna

Menurut Sumodiningrat (2003) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:33) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan usaha pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok miskin

agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain – lain. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraan.

Penyediaan informasi merupakan salah satu bentuk kebutuhan bagi masyarakat peternak sapi perah, sebab informasi sendiri merupakan pengetahuan yang perlu didapat oleh mereka. Pemerintah dinas Pertanian kabupaten Lumajang merupakan sumber primer penyedia informasi, sedangkan sekundernya pada masyarakat. Penyediaan informasi yang diberikan pemerintah berupa informasi kegiatan yang akan dilakukan, himbauan dan juga layanan konsultasi terkait cara beternak sapi perah yang baik. Sedangkan pada sumber informasi sekunder atau peternak sapi perah berperan memberikan informasi terkait dengan apa yang terjadi dilapangan atau yang terjadi padanya.

Maka dari kedua penjelasan diatas, dapat disimpulkan pola pemberian informasi dilakukan melalui dua arah yaitu pemerintah terhadap peternak sapi perah dan peternak sapi perah terhadap pemerintah, sehingga hal tersebut menciptakan aksesibilitas kepada masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain itu yang terjadi dilapangan terkait dengan penyediaan informasi dapat dikatakan dengan baik dan berjalan sesuai dengan asas pemberdayaan yaitu

pemerintah bekerjasama dengan peternak sapi perah dan bukan bekerja untuk peternak sapi perah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

1) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana merupakan suatu kebutuhan dalam hal peternakan sapi perah, sebab kegiatan peternakan sapi perah tidak bisa lepas dari sarana dan prasarana guna menunjang aktivitas peternakan sapi perah. Selain itu dalam kegiatan peternakan sapi perah maka diperlukan sarana dan prasarana seperti jalan produksi untuk menghubungkan ke lokasi penyetoran susu sapi dan jalan raya untuk memudahkan akses pengiriman susu kepada industri pengolahan susu. Mosher (1969) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:192) mensyaratkan adanya beragam sarana dan prasarana disetiap lokalitas usaha maupun distrik usaha. Keadaan beragam sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan oleh penyuluh maupun pemerintah diantaranya:

- 1) keadaan bahan baku atau sarana produksi, yang berupa benih/bibit, pupuk, pestisida/obat-obatan, baik menyangkut penyediaannya yang harus memenuhi persyaratan jumlah dan mutu yang dapat diandalkan maupun penyalurannya yang tepat waktu
- 2) Keadaan sarana pengangkutan, baik untuk pengangkutan sarana produksi, produk yang dihasilkan, maupun pengangkutan tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan disetiap lokalitas usaha maupun antar lokalitas usaha disetiap distrik usaha tani

3) Keadaan jalan, baik kelas jalan dan keadaannya

Berdasarkan pemaparan terkait dengan teori maka dapat disimpulkan bahwa beberapa prasyarat sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pemberdayaan. Selain itu adapun berikut hasil pemaparan diatas, pertama ketersediaan sarana produksi yang berupa pakan ternak dan bibit sapi perah. Peternak sapi perah memperoleh pakan ternak dari lahan miliknya sendiri namun hal tersebut dirasa kurang mencukupi sehingga peternak sapi perah bekerjasama dengan pemerintah yaitu dengan menyewa lahan milik perhutani untuk ditanami rumput. Selain itu terkait dengan bibit sapi perah, peternak sapi perah memperoleh bibit sapi perahnya dari hasil pembibitan sendiri dan dinas Pertanian juga telah bekerjasama dengan BBIB Singosari dalam penyaluran bibit sapi perah yang dinilai bermutu dan berkualitas.

Kedua akses distribusi, pada proses ini peternak sapi perah hanya menyetorkan hasil perahnya ke tempat penampungan susu yang telah disediakan oleh KUD.Tani Makmur di Senduro. Dalam proses distribusi pemerintah memberikan bantuan kepada peternak sapi perah berupa *milk can* yang dapat digunakan untuk menampung hasil pemerahan susu sapi.

Ketiga ketersediaan prasarana di kecamatan Senduro terutama pada jalan raya dan jalan produksi, umumnya

masyarakat kecamatan Senduro membutuhkan jalan raya untuk aktivitas sosial maupun ekonomi dan juga jalan produksi dari rumah peternak hingga menuju KUD.Tani Makmur juga sangat dibutuhkan oleh para peternak sapi perah. Untuk itu ketersediaan prasarana tersebut membantu aktivitas para peternak sapi perah di kecamatan Senduro.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sangat membantu kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh peternak sapi perah di kecamatan Senduro. Hal tersebut telah sesuai dengan yang dijelaskan Mosher (1969) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:192) mensyaratkan adanya beragam sarana dan prasarana disetiap lokalitas usaha maupun distrik usaha. Untuk itu aktivitas peternak sapi perah untuk mengembangkan peternakan sapi perah di kecamatan Senduro tidak akan berjalan tanpa dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan.

2) Peran dan Fungsi Kelembagaan Kelompok

Peran dan fungsi kelompok menurut salah satu responden menyatakan bahwa kelompok masih berjalan seperti biasanya. Hal ini dapat mendorong kegiatan para peternak sapi perah dalam mengembangkan usaha ternak sapi perahnya semisal tercipta hubungan yang baik bagi para peternak sapi perah untuk

bersosialisasi, bertukar pikiran dan juga menjawab berbagai permasalahan – permasalahan terkait peternakan sapi perah. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan keberadaan kelompok maka para anggota kelompok mulai terbantu dengan kegiatan – kegiatan yang dilakukan, terutama dalam mendorong aktivitas pengembangan ternak sapi perah di wilayahnya.

Keberadaan kelompok ini telah meningkatkan kemandirian para peternak sapi perah dalam melakukan kegiatan produktivitasnya. Selain itu juga kelompok ini bertujuan untuk memperkuat posisi pada kualitas peternakan sapi perah dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi kelompok bagi para peternak sapi perah di kecamatan Senduro dapat berperan dalam mendorong kegiatan – kegiatan yang dilakukan.

b. Faktor Penghambat

1) Rendahnya Kesadaran Peternak Sapi Perah

Salah satu faktor turunnya produktivitas peternakan sapi perah adalah karena serangan penyakit. Serangan penyakit yang sering dikeluhkan peternak sapi perah yaitu *matitis* dan *brucella*. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran peternak

sapi perah dalam menjaga kebersihan lingkungannya yaitu kandang sapi dan hewan ternak sapi itu sendiri.

Dinas Pertanian telah berusaha memberikan bimbingan kepada peternak sapi perah terkait permasalahan ini, yaitu dengan adanya program bimbingan teknis pencegahan penyakit hewan menular kepada para peternak sapi perah, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penyakit *mastitis* dan *brucella* dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan produksi susu serta dapat menyebabkan kematian. Hal tersebut tentu menyebabkan kerugian bagi para peternak sapi perah itu sendiri. Sehingga permasalahan tersebut dapat memperlambat roda pembangunan.

Padahal dalam usaha peternakan sapi perah dapat mempercepat pembangunan ekonomi di masyarakat, yang dimana dapat meningkatkan pendapatan peternak sapi perah dan lain sebagainya. Sehingga permasalahan pada hewan ternak yang masih rawan terhadap penyakit menjadi pokok permasalahan dan dapat memperlambat roda pembangunan terutama pada peningkatan produktivitas.

2) Kurangnya Penyuluhan Pemerintah Kepada Peternak Sapi Perah

Dalam kegiatan pemberdayaan Aditya (2003) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:39) menjelaskan bahwa menyangkut keberlanjutan program ataupun kegiatan yang

dilakukan pemerintah dengan mengembangkan mobilisasi atau partisipasi semu dimana masyarakat sasaran diajak, dipersuasi bahkan diperintah untuk ikut serta dalam proyek – proyek pemberdayaan yang dilakukan ternyata tidak terjaga keberlanjutannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, kritik terhadap program pemberdayaan biasa dilakukan pemerintah seringkali tidak mengalami keberlanjutan. Hal itu juga terjadi dalam pelaksanaan pemberdayaan pada beberapa peternak sapi perah di kecamatan Senduro, padahal peternak sapi perah tersebut masih memiliki ketergantungan terhadap peranan pemerintah dalam pengelolaan peternakan sapi perah. Peran pemerintah dalam melakukan pembinaan atau penyuluhan dirasa masih kurang, menurut salah satu peternak sapi perah pak Rido'i menyebutkan bahwa terkadang pemerintah hanya memberikan penyuluhan satu tahun sekali. Namun beliau juga menjelaskan bahwa jaranganya kunjungan tersebut dikarenakan objek kegiatan yang dilakukan di lain tempat dan setiap tahunnya bergantian. Sehingga dapat disimpulkan faktor keterbatasan jumlah aparatur akibatnya peran pemerintah kurang intens dalam melakukan pembinaan di wilayah tersebut. Akan tetapi pemerintah melakukan pembinaan dengan cara bergilir pada setiap wilayah yang ada di kabupaten Lumajang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah” yang berlokasi di kecamatan Senduro kabupaten Lumajang, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Pertanian kabupaten Lumajang telah melakukan implementasi strategi pemberdayaan dengan baik kepada para peternak sapi perah. Akan tetapi keberhasilan tersebut tidak terlepas dari beberapa hambatan di lapangan.

Adapun hasil penelitian ini, pertama pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan beberapa kegiatan penyuluhan seperti penyuluhan teknologi pengolahan pakan ternak. Kedua pengembangan kelembagaan kelompok dengan memberikan pelatihan perkoperasian kepada kelompok usaha ternak sapi perah yang menjadi anggota KUD.Tani Makmur. Ketiga bantuan modal masyarakat yaitu dengan pemberian bantuan modal berupa program KUR dimana peternak sapi perah mendapatkan bantuan dana sekitar 25 juta perorang guna mengembangkan usaha ternak sapi perahnya Keempat pengembangan usaha produktif yaitu dengan penyuluhan teknologi pasca panen oleh Dinas Pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan peternak sapi perah itu. Kelima yaitu ketersediaan informasi yang diberikan pemerintah yaitu dengan adanya hubungan timbal balik dari pemerintah dengan peternak yaitu memberikan informasi dan sebaliknya

peternak sapi perah menyampaikan keluhan – keluhan yang dihadapi sehingga tercipta hubungan kerjasama yang baik dalam pemberian informasi.

Disamping itu, strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan peternak sapi perah sempat mengalami beberapa hambatan diantaranya keberlanjutan kegiatan pemberdayaan itu sendiri, yang cenderung bersifat sementara sehingga peternak sapi perah hanya diarahkan ketika kegiatan dilakukan. Selain itu permasalahan terhadap penyakit yang sering dikeluhkan peternak sapi perah sehingga peran dari pemerintah terkait dengan masalah tersebut sangat dibutuhkan agar peternak sapi perah sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungannya.

B. Saran

1. Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang bisa memberikan pendampingan yang lebih intens (sering) kepada peternak sapi perah agar peternak sapi perah dapat mengembangkan usaha ternak sapi perahnya sehingga menghasilkan produktivitas yang baik dan dapat meningkatkan perekonomian, karena masih ada peternak sapi perah yang mengeluh jarang nya kehadiran dari dinas terkait.
2. Untuk meningkatkan kesadaran peternak sapi perah dalam mengembangkan usaha ternak sapi perahnya, Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dapat melakukan pendekatan dengan cara lebih sering berkomunikasi dengan para peternak sapi perah baik melalui sosialisasi kelompok maupun perseorangan yang nantinya dapat disalurkan kepada peternak sapi perah yang lainnya.

3. Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dapat memberikan wawasan terhadap kegiatan pemberdayaan yang lebih berkelanjutan, sebab yang terjadi dilapangan kegiatan – kegiatan pemberdayaan hanya bersifat semu atau sementara atau hanya menekankan kepada kegiatan yang sementara.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Akbar, Husnaini Usman dan Setiady, Purnomo. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anni. L, Wennadi. L.Y, Udaya. J. 2003. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Daryanto, Arief. 2009. *Dinamika Daya Saing Industri Peternakan*. Bogor: IPB Press.
- David, Fred R. 2009. *Manajemen Strategis Konsep, Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Desentralisasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Girisona. 1995. *Petunjuk Beternak Sapi Perah*. Yogyakarta : Kanisius.
- Himpuni, Okwan. 2008. *Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Alam Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Program Sarjana Agribisnis Penyelenggaraan Khusus Departemen Agribisnis FEM IPB. Bogor. Internet. www.google.com (1 Oktober 2017).
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, Matthew B.,A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Edition 3. California: Sage Publication Inc.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Nasrin, Chairun dan Alamsyah. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good Governance*. Malang: Indo Press.
- Nurdin, E. 2011. *Manajemen Sapi Perah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminitrasi*. Yogyakarta: Lasbang Pressindo.
- Salusu, J. 2002. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT. Grasindo.
- _____. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Schmidt GH, Hutjuers MF. 1998. *Principles of Dairy Science*. 2nd Edition. Prentice-Hall. Englewood Cliffs.
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2012. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, Edy. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaismana, Tri Septyan. 2016. *Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri Kecil Kripik Pisang di Lumajang*. Malang. FIA-UB.
- Sulistyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: IKAPI.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi – Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UM Press.
- Theresia, Aprillia et.al. 2015. *Pembangunan Berbasis Mayarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Yusdja, Y. 2005a. *Kebijakan Ekonomi Industri Agribisnis Sapi Perah di Indonesia*. Agricultural Policy Analysis. Volume 3 Nomor 3 (September): 256 – 267.
- Yusdja, Y. 2005b. *Kebijakan Ekonomi Industri Agribisnis Sapi Perah di Indonesia*. Agricultural Policy Analysis. Bogor: Pusat Studi EkonomiKementrian Pertanian. <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/>. [25 Oktober 2017].

Sumber Lain

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani



LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG

| No | Pertanyaan | Jawaban yang diharapkan |
|----|---|---|
| 1 | Apa saja kegiatan Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan bagi peternak sapi perah di kecamatan Senduro? | Mengenai kegiatan – kegiatan yang dilakukan pemerintah bagi peternak sapi perah yang dilihat dari input (yang dilakukan), output (tujuan yang dilakukan) dan outcome (manfaat yang didapat) |
| 2 | Pengembangan sumberdaya manusia a. Apa saja yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengembangan sumberdaya manusia bagi peternak sapi perah? b. Apa tujuan – tujuan dari kegiatan tersebut? c. Apa manfaat dari kegiatan tersebut? d. Dimana saja kegiatan tersebut dilakukan? e. Bagaimana cara pelaksanaan kegiatan tersebut? f. Siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut? dan apa saja peranannya? | Mengenai kegiatan pemerintah dalam pengembangan sumberdaya manusia di kecamatan Senduro berdasarkan input, output dan outcome serta berdasarkan data |
| 3 | Pengembangan kelembagaan kelompok a. Apa saja yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengembangan kelembagaan kelompok? b. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? c. Apa manfaat dari kegiatan tersebut? d. Bagaimana cara pelaksanaan kegiatan tersebut? e. Dimana saja kegiatan tersebut dilakukan? f. Siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut? dan apa saja peranannya? | Mengenai kegiatan pemerintah dalam pengembangan kelembagaan kelompok di kecamatan Senduro berdasarkan input, output dan outcome serta berdasarkan data |
| 4 | Bantuan modal masyarakat a. Apakah ada pemberian modal bagi para peternak sapi perah? b. Apa tujuan dari pemberian modal tersebut? | Mengenai kegiatan pemerintah dalam pemberian modal usaha di kecamatan Senduro |

| | | |
|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> c. Apa manfaat dari pemberian modal tersebut? d. Siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut? e. Bagaimana bentuk dari pemberian modal usaha? f. Bagaimana alur mendapatkan bantuan tersebut? g. Bagaimana pelaporan dari penggunaan bantuan tersebut? h. Digunakan untuk apa saja bantuan tersebut? (apabila berbentuk uang) | berdasarkan input, output dan outcome serta berdasarkan data |
| 5 | <p>Pengembangan usaha produktif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apakah ada kegiatan pemerintah / dinas terkait dalam mengembangkan usaha produktif di kecamatan Senduro? b. Lokasinya dimana saja? c. Atas dasar apa kegiatan itu dilakukan? d. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? e. Apa manfaat yang di dapat dari kegiatan tersebut? f. Apa kendala – kendala dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut? | Mengenai kegiatan pemerintah dalam pengembangan usaha produktif di kecamatan Senduro berdasarkan input, output dan outcome serta berdasarkan data |
| 6 | <p>Penyediaan informasi tepat guna</p> <p>Bagaimana bentuk pemerintah dalam menyediakan informasi bagi para peternak sapi perah?</p> | Mengenai cara pemerintah dalam menyediakan informasi bagi para peternak sapi perah |
| 7 | <p>Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah / dinas terkait dalam memberikan pemberdayaan kepada peternak sapi perah? (baik dari sisi internal maupun eksternal dinas terkait)</p> | Mengenai kendala – kendala yang dihadapi pemerintah / dinas terkait |

PEDOMAN WAWANCARA

PETERNAK SAPI PERAH KECAMATAN SENDURO

| No | Pertanyaan | Jawaban yang diharapkan |
|----|---|---|
| 1 | Peternakan sapi perah a. Mengapa memilih memelihara sapi perah? b. Apakah ada pekerjaan lainnya selain memelihara sapi perah? c. Berapa harga susu sapi perah? d. Kemana saja susu sapi perah dijual? e. Apakah harga yang dijual sesuai dengan yang diharapkan? | Mengenai peternakan sapi perah di kecamatan Senduro |
| 2 | Pengembangan sumberdaya manusia a. Apa pernah ada kegiatan pemerintah / dinas terkait dalam memberikan pelatihan atau pembinaan? b. Apa saja kegiatannya? c. Apakah merasa perlu dengan adanya kegiatan tersebut? d. Bagaimana bentuk dari kegiatan tersebut? e. Siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut? f. Apa manfaat yang didapat dari kegiatan tersebut? | Mengenai klarifikasi pernyataan dinas terkait dan mencari manfaat (outcome) yang didapat dari objek kegiatan tersebut |
| 3 | Pengembangan kelembagaan kelompok a. Apakah pernah ada kegiatan pemerintah / dinas terkait dalam memberikan pengembangan kelembagaan kelompok? b. Apa saja kegiatannya? c. Apakah merasa perlu dengan adanya kegiatan tersebut? d. Bagaimana bentuk dari kegiatan tersebut? e. Siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut? a. Apa manfaat yang didapat dari kegiatan tersebut? | Mengenai klarifikasi pernyataan dinas terkait dan mencari manfaat (outcome) yang didapat dari objek kegiatan tersebut |
| 4 | Bantuan modal masyarakat a. Apakah pernah ada pemberian bantuan modal usaha ? b. Apa bentuk dari modal usaha tersebut? c. Apakah merasa perlu dengan adanya bantuan tersebut? d. Siapa saja yang menerima bantuan tersebut? e. Digunakan untuk apa saja modal tersebut? | Mengenai klarifikasi pernyataan dinas terkait dan mencari manfaat (outcome) yang didapat dari objek kegiatan tersebut |

| | | |
|---|--|---|
| | f. Apa manfaat yang didapat dari modal tersebut? | |
| 5 | <p>Pengembangan usaha produktif</p> <p>a. Apakah ada kegiatan pemerintah / dinas terkait dalam pengembangan usaha produktif di kecamatan Senduro?</p> <p>b. Lokasinya dimana saja?</p> <p>c. Apakah merasa perlu dengan adanya kegiatan pengembangan usaha produktif di kecamatan Senduro?</p> <p>d. Apakah manfaat dari kegiatan pengembangan usaha produktif di kecamatan Senduro?</p> | Mengenai klarifikasi pernyataan dinas terkait dan mencari manfaat (outcome) yang didapat dari objek kegiatan tersebut |
| 6 | <p>Penyediaan informasi tepat guna</p> <p>a. Bagaimana komunikasi yang terjalin dengan pemerintah?</p> <p>b. Apakah pemerintah memberikan informasi – informasi bagi anda terkait dengan usaha peternakan sapi perah?</p> <p>c. Seperti apa bentuknya?</p> | Mengenai klarifikasi pernyataan dinas terkait dan mencari manfaat (outcome) yang didapat dari objek kegiatan tersebut |
| 7 | Apa saja kendala yang dialami dalam usaha peternakan sapi perah? (baik dari sisi internal dan eksternal peternak sapi perah) | Mengenai kendala – kendala yang dihadapi peternak sapi perah |

Lampiran 2

Wawancara dengan Kasi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian Kab. Lumajang



Wawancara dengan Ketua KUD.Tani Makmur Senduro



Wawancara dengan Peternak Sapi Perah



Kandang Sapi Perah



Lampiran 3

122

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id

LUMAJANG - 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN

Nomor : 072/133 /427.75/2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

Menimbang : Surat Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor: 18573/UN10.F03.11.11/PN/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Penelitian / Survey atas nama REGINE ANDARA SARASWATI PUTRI.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : REGINE ANDARA SARASWATI PUTRI
2. Alamat : Dusun Tumpeng Krajan 001/002 Kecamatan Candipuro, Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Brawijaya Malang / 145030101111101
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan :

1. Judul Proposal : Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Perah
2. Tujuan : Penelitian
3. Bidang Penelitian : Administrasi Publik
4. Penanggung jawab: Dr. Lely Indah Mindarti M.Si
5. Anggota/Peserta : -
6. Waktu Penelitian : 19 Januari 2018 s/d 19 Maret 2018
7. Lokasi Penelitian : Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dan Desa Kandangtepus Kec. Senduro

Dengan ketentuan : 1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;

2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;

3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;

4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 18 Januari 2018

a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN LUMAJANG

Sekretaris,


HERI SUSANTO, SH
NIP. 19830712 198503 1 012

Tembusan Yth. :

1. Bpk. Bupati Lumajang (sebagai laporan).
2. Sdr. Ka. Polres lumajang,
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang,
4. Sdr. Ka. Dinas Pertanian Kab. Lumajang,
5. Sdr. Camat Senduro,
6. Sdr. Kades Kandangtepus Kec. Senduro,
7. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang,
8. Sdr. Yang Bersangkutan.

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Regine Andara Saraswati Putri
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 9 Februari 1996
3. Agama : Islam
4. Alamat Asal : Dsn. Tumpeng Krajan RT/RW 01/02
Desa Tumpeng Kecamatan Candipuro
Kabupaten Lumajang
5. Alamat Malang : Jln. Watumujur II Nomor 3
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
6. Telp : 082336424468
7. Email : regineandara@gmail.com

PENDIDIKAN

1. TK Dharma Wanita Tumpeng (2000-2002)
2. SDN Tumpeng 01 (2002-2008)
3. SMPN 01 Tempeh (2008-2011)
4. SMA PGRI 01 Lumajang (2011-2014)
5. S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2014-2018)